

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 18

1984

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 13 TAHUN 1984

TENTANG :
POLA DASAR PEBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat merupakan landasan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat, baik dalam hubungannya dengan pembangunan jangka panjang maupun dengan pembangunan jangka menengah atau lima tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil-hasil pembangunan selama PELITA III di Jawa Barat membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam hal potensi dan kondisi serta permasalahan dan atau kualitasnya, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat yang disusun lima tahun yang lalu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/Dp.040/PD/79 tanggal 29 Maret 1979 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa Pola Kebijaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9/PD-DPRD/74 tanggal 23 Januari 1974, agar dapat dilaksanakan sehingga terwujud sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan perkembangan pembangunan serta perkembangan jangkauan penyelenggaraan pemerintah di Jawa Barat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan Nasional.
- MENGINGAT :
- 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- 4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
- 6.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Bangda 1/9/26 tanggal 26 Nopember 1978 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- 7.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9/PD-DPRD/74 tanggal 23 Januari 1974 tentang Pola Kebijaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat disusun sebagai berikut :

- (1) Bab I: Pendahuluan
- (2) Bab II : Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
- (3) bab III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah.
- (4) Bab IV : Penutup.

Pasal 2

isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

pasal 4

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat menyusun serta menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Jawa Barat.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/Dp.040/PD/79 tanggal 29 Maret 1979 dan hal-hal serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 31 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Ketua,

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan Surat Keputusan tanggal 13 September 1984 Nomor 050.32-694 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 20 September tahun 1984 Nomor 18 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

BAB I

PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah garis-garis besar

kebijaksanaan dan arah pembangunan Wilayah Daerah Tingkat I yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara, dengan memperhatikan kondisi, potensi daerah dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat di daerah/serta sebagai dasar bagi pembangunan selanjutnya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya menyangkut pengembangan dinamis jiwa juang manusianya, kondisi juang masyarakatnya, dan ruang juang lingkungan serta prasarananya.

Pembangunan sebagai usaha perubahan kearah yang lebih baik secara simultan, terus menerus dan berkesinambungan mengusahakan suatu ruang juang yang seimbang dan lestari, kondisi juang yang makin maju dan berkembang serta jiwa juang yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Ruang juang yang makin seimbang dan lestari memungkinkan pemanfaatannya yang makin besar, baik untuk kepentingan pembangunan maupun untuk Pertahanan Nasional, kondisi juang yang makin maju dan berkembang memungkinkan pencapaian tahap pembangunan serta ketahanan Nasional yang lebih tinggi, dan jiwa juang yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 memungkinkan kesinambungan perjuangan bangsa dan negara.

Dalam kerangka pembangunan dan ketahanan Nasional tersebut, usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat dimulai dengan peningkatan kualitas manusia sebagai unsur utama dalam pembangunan, baik manusia sebagai individu maupun manusia sebagai makhluk sosial di mana kesemuanya itu dlandasi oleh Agama serta sesuai dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Dengan landasan Agama dimaksudkan agar masyarakat Jawa Barat senantiasa Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga memiliki bekal spiritual yang mampu mengimbangi dan mengikuti segala perubahan baik fisik maupun sosial termasuk perubahan tata nilai yang terjadi akibat pembangunan yang makin pesat. Sedangkan Pancasila dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalannya, merupakan falsafah dan landasan untuk mempertinggi kualitas masyarakat Jawa Barat yang sepanjang sejarahnya memiliki nilai budaya yang luhur.

Dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai individu, tidak hanya sekedar diarahkan untuk prima dalam kualitas fisik (sehat) tetapi juga prima dalam kecerdasan dan keakhlian, matang dalam agama, akhlak dan budi pekerti, luwes dalam pergaulan serta senantiasa dalam kondisi dan jiwa juang yang tinggi.

Akan halnya dengan peningkatan kualitas manusia sebagai makhluk sosial, maka pembinaan diarahkan kepada pembentukan rasa tanggung jawab yang tinggi pada lingkungan, bagi lingkungan fisik maupun sosial, dimulai dengan lingkungan terdekat di seputar

diri sendiri, berangkai, serempak (simultan) dan berujung pada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dalam lingkup ini tersirat semangat kebersamaan untuk "silih asah, silih asih dan silih asuh", sikap hidup yang memiliki kedalaman dan keluasan wawasan serta senantiasa mengindahkan nilai-nilai budaya yang luhur.

Dengan demikian maka kondisi juang pun akan selalu makin berkembang dan mantap.

Penataan ruang dilakukan tidak hanya berorientasi kepada pemanfaatan tetapi juga berwawasan lingkungan yang berkaitan erat dengan pembentukan ruang juang yang seimbang dan lestari sehingga memungkinkan dilakukannya perjuangan yang terus menerus dan berkesinambungan.

Semua usaha dalam rangka pembangunan nasional tersebut mempunyai dua tujuan yang tidak terpisahkan yaitu keajahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan ketahanan Nasional, sedangkan ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan Nasional.

ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi setiap aspek kehidupan, penghidupan dan lingkungan hidup Bangsa dan Negara yang pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Konsepsi ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang tata tenteram kerta raharja dalam kehidupan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah untuk menjadi pedoman penyusunan rencana Pembangunan Daerah dengan tujuan untuk memberikan arah rencana pembangunan lima tahun berikutnya dan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita dan aspirasi masyarakat Jawa Barat sejalan dengan arah pembangunan Nasional yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

3. SUSUNAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu lima tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang, Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat disusun dan dituangkan dalam sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
- III. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah
- IV. Penutup.

BAB II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

1. PENDAHULUAN

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang adalah garis-garis besar arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 25 sampai 30 tahun, disusun dengan maksud menjadi pedoman penyusunan Pola Umum Pelita Daerah, dan bertujuan untuk memberikan arah rencana pembangunan lima tahun berikutnya.

Dengan demikian secara bertahap dapat terwujud cita-cita dan aspirasi masyarakat Jawa Barat sejalan dengan arah pembangunan nasional yang terkandung dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Jawa Barat telah dimulai sejak tahun 1969/1970 dengan pembangunan lima tahun (PELITA) yang pertama, disusul dengan Pelita kedua, dan ketiga serta selanjutnya sehingga merupakan rangkaian Pelita yang saling menyambung dalam satu kesatuan yang serasi.

Jawa Barat adalah daerah yang dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa dengan alam lingkungan yang indah dan nyaman, serta tanah yang subur makmur; masyarakat mensyukuri-Nya dengan iman dan taqwa dalam rukun dan damai dengan sesamanya.

Kedudukan geografis daerah Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai arti sangat penting yang bersifat strategis, baik dipandang dari segi pembangunan maupun dari segi keamanan dan ketertiban.

Stabilitas ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan (ipoleksosbud hankam) dan agama di Jawa Barat merupakan indikator stabilitas ipoleksosbud hankam dan agama di tingkat Nasional.

Kedudukan tersebut merupakan salah satu kekhususan Jawa Barat yang sangat penting di samping kekhususan lainnya.

Dilihat dari segi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat menyumbang sebesar 15 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, produksi padi Jawa Barat menyumbang 23 %, produksi perikanan darat, produksi teh dan kina memberikan sumbangan terbesar terhadap produksi Nasional. Demikian pula produksi beberapa bahan tambang dan galian seperti bentonit, emas dan perak.

Dilihat dari segi sosial, banyak perguruan tinggi pemerintah dan swasta yang berskala nasional seperti ITB, IPB, IKIP, UNPAD, dan IAIN berada di Jawa Barat, demikian pula lembaga-lembaga penelitian sebagian besar berada di Jawa Barat.

Kondisi spesipik semacam ini memberikan peran dan fungsi spesipik pula terhadap daerah Jawa Barat, serta memberikan dorongan dan tuntutan upaya untuk lebih berhasilnya pembangunan Daerah Jawa Barat.

2. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

a. Fisik.

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat terletak di ujung sebelah Barat Pulau Jawa antara 5 derajat 50'-- 7 derajat 50' lintang selatan dan antara 104 derajat 48' -- 108 derajat 48" bujur timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah utara dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, di sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia.

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan luas 44.176 km² terdiri dari 20 kabupaten, 4 kotamadya, 5 kota administratif, 429 kecamatan dan 6.290 desa/kelurahan meliputi 48 buah pulau yaitu 20 pulau terletak di Selat Sunda, 14 pulau terletak di teluk Banten, 10 pulau terletak di Samudra Hindia dan 4 pulau terletak di Laut Jawa.

Persentase penggunaan lahan dari Wilayah Jawa Barat pada awal Pelita I sebagai berikut : hutan 22 %, sawah 25 %, perkebunan 10 % (menurut status perkebunan besar), kebun campuran 13 %, pertanian lahan kering 13 %, pemukiman 6 % dan lain-lain 11 % (termasuk jalan, pengairan, sungai, danau dan sebagainya). Pada akhir Pelita III hutan tinggal 21 % dan luas perkebunan besar tinggal 6 %, jadi 1 % dari luas hutan dan 4 % dari luas perkebunan besar beralih fungsinya menjadi pertanian lahan kering, kebun campuran atau sawah dan lain-lain.

Faktor iklim antara lain curah hujan dan suhu erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Di Jawa Barat curah hujan rata-rata tahunan sekitar 2.000 mm, namun di beberapa daerah pegunungan berkisar sekitar 3.000 mm sampai dengan 5.000 mm terutama di lereng-lereng hadap angin. Hal ini mengakibatkan bervariasinya tipe iklim Daerah Jawa Barat. Suhu bervariasi antara 9 derajat C seperti di puncak Gunung Pangrango, dan 26 derajat C di dataran rendah daerah utara.

Di Jawa Barat terdapat 514 buah sungai besar dan kecil termasuk anak-anak sungainya. Berdasarkan aliran sungai tersebut Jawa Barat terbagi menjadi di 14 wilayah aliran sungai. Banyaknya aliran sungai menyebabkan pula terdapatnya daerah-daerah banjir rutin seperti di perbatasan Tangerang beberapa daerah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Bandung, Subang, Indramayu, Cirebon dan Ciamis. Dari sekian banyak sungai tersebut ada yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan pengairan besar.

Tetapi pemanfaatannya masih belum optimal dalam arti masih memungkinkan perluasan sawah yang dapat diairi dengan

peningkatan teknik pengairannya.

Potensi-potensi yang masih dapat digali ialah sumber tenaga air sungai yang bisa diubah menjadi sumber tenaga listrik, seperti Citarum di Jati Luhur, Saguling dan Cirata, serta Cimanuk di Jatigede, juga beberapa sungai yang mempunyai kemiringan tinggi di bagian selatan Jawa Barat.

Oleh karena itu Jawa Barat dapat memberikan sumbangan yang besar (23%) dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional. Di samping itu Jawa Barat juga mempunyai sumber panas bumi yang merupakan potensi tenaga pembangkit listrik.

Tenaga panas bumi yang telah dimanfaatkan adalah di Kamojang dan yang masih potensial antara lain di Gunung Salak dan Cisolok/Sukabumi.

Potensi sumber alam ada pula yang merupakan kendala bagi pembangunan, antara lain ialah 6 buah gunung berapi yang aktif yaitu : Gunung Gede, Gunung Tangkubanparahu, Gunung Papandayan, Gunung Galunggung, Gunung Guntur dan Gunung Ciremai, yang sewaktu-waktu dapat meletus dan menyebabkan bencana. Di samping itu terdapat daerah gerakan tanah yang antara lain disebabkan oleh faktor-faktor topografi (lereng), keadaan tanah/batuan termasuk struktur dan pelapisan, perembesan air sebagai akibat curah hujan, gempa bumi dan keadaan vegetasi. Daerah gerakan tanah terbagi menjadi daerah waspada yaitu sekitar Gunung Salak dan Gunung Pangrango, daerah berpotensi di Jawa Barat bagian tengah dan selatan sepanjang lipatan dari gunung berapi dan daerah kritis gerakan tanah di Ciamis utara, Tasikmalaya selatan, Garut selatan, Padalarang, Cianjur selatan, Sukabumi selatan, Subang dan sekelilingnya Gunung Ciremai.

Perhubungan darat yang meliputi jaringan jalan raya dan jaringan kereta api pada kondisi terakhir adalah sebagai berikut : jaringan jalan negara dan jalan propinsi yang mantap 623,75 km dan yang belum mantap 1.921,16 km, sedangkan jaringan jalan kereta api sepanjang 1.198 km termasuk beberapa ruas yang kurang/tidak berfungsi.

Perhubungan udara dengan pelabuhan-pelabuhan udara yang berfungsi komersial adalah Husen Sastranegara (Bandung) dan Penggung (Cirebon), selain itu masih ada beberapa pelabuhan udara lainnya yang dapat/sedang dikembangkan untuk mendukung perkembangan daerah yaitu : Gorda (Serang), Curug (Tangerang), Kalijati (Subang), Sukani (Jatiwangi), Pelabuhanratu (Sukabumi), Cibeureum (Tasikmalaya) dan Sulaeman (Bandung), demikian pula pelabuhan udara Internasional Cengkareng.

Untuk pelabuhan laut di Jawa Barat telah ada Pelabuhan yang berfungsi sebagai pelabuhan Nusantara plus (Cirebon dan Cigading) di samping ada pelabuhan-pelabuhan lain yang berstatus sebagai pelabuhan nelayan dan pelabuhan untuk pelayaran rakyat, antara lain : Labuan, Pangandaran, Cilauteureum, Palabuanratu, Muarabinuangun dan yang paling potensial untuk dikembangkan adalah pelabuhan Ciwandan di Kabupaten Serang.

Pelabuhan nelayan erat kaitannya dengan pemanfaatan potensi laut. Pantai sekeliling Jawa Barat yang panjang dengan laut/samudera yang sangat luas merupakan potensi yang sangat besar, terutama perikanan lautnya yang merupakan sumber penghidupan nelayan.

Penyebaran kota-kota secara geografis di Jawa Barat cukup baik, beberapa kota tumbuh dengan cepat terutama di sekitar Jakarta yaitu : Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, di samping itu juga Bandung, Cirebon, Tasikmalaya dan Serang. beberapa kota kecil yang letaknya strategis juga berkembang secara cepat yaitu Cilegon, Cikampek, Pamanukan, Jatibarang, Kadipaten dan banjar.

mengenai pariwisata Jawa Barat dibagi menjadi lima wilayah pariwisata, yang masing-masing wilayah tersebut memiliki sejumlah obyek wisata sebagai berikut : Wilayah Pariwisata Banten mempunyai 12 buah obyek wisata, Wilayah Pariwisata Bogor 16 obyek wisata, Wilayah Pariwisata Bandung 20 obyek wisata, Wilayah Pariwisata Cirebon 19 obyek wisata dan Wilayah Pariwisata Priangan Timur 12 obyek wisata, jadi semuanya berjumlah 79 buah obyek wisata yang sudah aktual. Di samping itu masih terdapat banyak obyek wisata yang potensial dalam arti belum berfungsi dan dibina sebagaimana mestinya. Dilihat dari segi pengelolaannya 75,6 % dikelola oleh pemerintah dan 24,4 % dikelola oleh swasta. Potensi pariwisata terbesar di Jawa Barat adalah potensi alam, baik berupa pantai, gunung berapi/kawah, air panas dan sebagainya. Potensi alam di Jawa Barat merupakan potensi yang paling memungkinkan untuk dikembangkan, di samping potensi-potensi lainnya seperti potensi budaya.

Potensi mineral di Jawa Barat seperti : batubara, emas, perak, tembaga, pirit dan gas bumi terdapat di daerah pegunungan atau di daerah lipatan sekitar Bayah, Jampang Sukabumi, bagian barat Purwakarta, Cirebon dan bagian selatan Tasikmalaya. Macam bahan mineral lainnya seperti gamping, pasir kuarsa, lignit dan pospor terdapat juga di daerah Jampang dan Sukabumi. Di Cibadak ditemukan pasir kuarsa dan di Bogor ditemukan yudium, fosfat dan kuarsa. Di Purwakarta bagian utara ditemukan tembaga, timah hitam, fosfat, yodium, gamping, granit dan di Subang yarosit. Di Tasikmalaya terdapat pertambangan gamping, bentonit, tembaga dan di Pangandaran fosfat. Belerang banyak terdapat di sekitar Bandung yaitu di Gunung Patuha, Tangkubanparahu, Papandayan, dan Talagabodas. Di Daerah Cirebon terdapat minyak bumi, gamping, gypsum, marmer, juga sedikit emas, perak dan besi hitam. Sedangkan tanah liat banyak ditambang di Cirebon, Tasikmalaya Bandung, Purwakarta, Bogor dan Lebak.

b. Kependudukan.

Tingkat pertumbuhan penduduk sampai tahun 1980 masih tinggi. selama masa 1961 -- 1971 pertumbuhan penduduk rata-rata 2,09 % setahun dan dari tahun 1971 -- 1980 meningkat lebih tinggi yaitu rata-rata 2,66 % setahun. Pertumbuhan yang cukup tinggi

di Jawa Barat bagian utara dan tengah, sedangkan di Jawa Barat bagian Selatan pertumbuhannya relatif rendah. Perbedaan tingkat pertumbuhan tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepadatan sehingga Jawa Barat bagian utara dan tengah relatif lebih padat daripada di bagian selatan.

Kepadatan yang paling terdapat di Kotamadya-kotamadya : Bandung (18,047 per km²), Bogor (11,454 per km²), Cirebon (6,202 per km²), Sukabumi (9,045 per km²). Pada tahun 1961 kepadatan penduduk Jawa Barat rata-rata tercatat 399 orang per km², tahun 1971 menjadi 489 orang per km² dan pada tahun 1980 meningkat menjadi 621 orang per km². Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 1980 tercatat 27.672.620 orang.

Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Jawa Barat tersebut pada tahun 1985 menjadi 30,9 juta, tahun 1990 akan menjadi 34,7 juta, pada tahun 1995 akan menjadi 38,9 juta dan tahun 2000 nanti diperkirakan akan menjadi 43,5 juta.

Dengan perkembangan jumlah seperti tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pertumbuhannya turun sedikit demi-sedikit pada periode 1980--1985 rata-rata 2,35% per tahun, pada periode 1985--1990 rata-rata 2,32% per tahun, lima tahun kemudian turun menjadi 2,3% per tahun, dan sampai tahun 2000 menjadi 2,26% per tahun. Maka jelaslah bahwa sampai tahun 2000 tingkat pertumbuhan penduduk Jawa Barat masih tergolong tinggi/pesat, suatu tantangan yang cukup berat bagi semua pihak.

Penyebaran penduduk kota dan desa selama masa 1961--1980 menunjukkan kecenderungan yang makin mengarah keperkotaan. Tahun 1961 penduduk perkotaan tercatat sekitar 11,28%, tahun 1971 meningkat menjadi 12,41% dan tahun 1980 meningkat cukup tinggi menjadi 20,82% dari jumlah penduduk Jawa Barat.

Dari kelompok umur usia kerja yang pada tahun 1980 tercatat 70%, ternyata bahwa kelompok usia kerja di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan. Salah satu sebabnya antara lain derasnya arus migrasi masuk ke Jawa Barat. Pada tahun yang sama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Barat tercatat sebesar 45,4% terdiri dari pekerja dan pencari kerja. TPAK di perkotaan lebih kecil daripada di pedesaan, yang berarti bahwa kelompok usia kerja di perkotaan lebih banyak yang bersekolah dibandingkan dengan di pedesaan. Persentase kerja terhadap angkatan kerja pada tahun 1980 tercatat 98%, dengan demikian persentase pencari kerja adalah 2%.

Bila dibedakan menurut lapangan usahanya tercatat pekerja di sektor pertanian 48,2%, sektor perindustrian 10,6%, sektor perdagangan 16,0%, sektor bangunan 4,2%, sektor angkutan dan komunikasi 3,6% serta sektor jasa 15,7%. Kecuali sektor pertanian, sektor-sektor lainnya menunjukkan peningkatan di bandingkan dengan tahun 1971. Selama 1971--1980 angkatan kerja meningkat rata-rata 2,9% per tahun atau sekitar 70 ribu angkatan kerja yang akan masuk pasar kerja, hal ini merupakan potensi

yang sangat menentukan.

c. Sosial.

karakteristik masyarakat Jawa barat yang berdaya luhur, religius, kritis, kreatif, tanggap dan konstruktif merupakan potensi yang dapat dikembangkan ke arah rasionalisasi dan modernisasi. Semangat kegotong-royongan merupakan potensi dalam pelaksanaan pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan ke arah partisipasi yang positif menuju sasaran yang sudah digariskan. Seni budaya daerah di Jawa barat sebagai lambang kebanggaan dan identitas Jawa Barat merupakan faktor potensial dalam Pembangunan Nasional. Bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan masyarakat berpotensi sebagai media komunikasi dalam keluarga dan masyarakat merupakan pula sarana pembinaan budi luhur bangsa Indonesia.

Jumlah tempat peribadatan di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 1974 tempat peribadatan Islam tercatat 111 ribu buah dan meningkat menjadi 144 ribu buah pada tahun 1980. Tempat peribadatan tersebut terdiri dari mesjid, langgar dan mushola.

Mesjid selama masa yang sama meningkat dari 24 ribu buah menjadi 31 ribu buah. Langgar dari 75 ribu menjadi 100 ribu buah dan mushola dari 11 ribu menjadi 12 ribu buah.

Demikian pula dengan gereja dari 211 menjadi 439 buah, selama masa yang sama. Pesantren pada tahun 1980 tercatat sebanyak 2690 buah. Guru/ustadz tercatat sebanyak 7.974 orang. Zakat Fitrah selama masa 1974 -- 1980 meningkat hampir 17 kali, dari Rp. 99 juta pada tahun 1974 menjadi Rp. 1,76 milyar pada tahun 1980.

Tingkat pendidikan penduduk Jawa Barat masih rendah masih banyak penduduk yang buta huruf dan putus sekolah.

Sampai tahun 1982 di Jawa Barat terdapat sekolah dasar negeri/swasta sebanyak 21.436 buah dengan jumlah ruang kelas 117,499 dan ratio antara murid dengan guru = 40 : 1. Jumlah SMTP umum ada 1.914 buah dengan jumlah ruangan kelas 10.295 buah dan ratio murid : guru = 20 : 1, SMTP kejuruan terdapat 72 buah dengan ruangan kelas 499 buah, ratio murid dengan guru = 18 : 1, SMTA umum tercatat 543 buah dengan ruang kelas sebanyak 3.719 buah dan ratio murid : guru = 19 : 1, SMTA kejuruan sebanyak 328 buah dengan ruangan kelas sebanyak 2.660 buah dan ratio murid : guru = 14 : 1.

Berbagai eksekse dapat diketemukan dalam kehidupan sosial yang timbul akibat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat antara lain pengangguran yang tinggi, baik yang kentara maupun yang tidak kentara di sektor pertanian dan di sektor lainnya, hal mana dapat menimbulkan sifat-sifat apatis, frustrasi dan kejahatan. Di samping itu masih terdapat sebagian masyarakat yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesehatan masyarakat pada umumnya masih rendah dan sensitif terhadap epidemi. Pada tahun 1982 terdapat 76 rumah sakit dan 22 rumah bersalin dengan jumlah tempat tidur 10.987 buah. Ratio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk 1 : 2.620. Disamping itu masih terdapat 1 : 232 tempat tidur di 74 Puskesmas. Dari 76 rumah sakit apabila dilihat dari jenisnya terdiri dari 1 buah RSUP, 52 RSU dan 16 RS khusus yaitu 1 RS mata, 3 RSTP, 3 RS jiwa, 1 RS kusta dan 7 RSB. Sedangkan 22 RB yang ada terdiri dari 2 buah milik ABRI, satu milik Departemen lain/BUMN dan 19 milik swasta.

Di Ibu Kota Propinsi terdapat satu buah rumah sakit umum kelas B (RSUP Hasan Sadikin) dan di DT. II 26 RSU. Dari 26 RSU DT. II dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 7 buah kelas C yang kemudian pada tahun 1983 bertambah menjadi 11 buah, dan 19 buah kelas D yang pada tahun 1983 berubah menjadi 15 buah.

Sedangkan jumlah tenaga dokter umum ada 1.066, dokter spesialis 281, dokter gigi 328, perawat 2.342 dan bidan sebanyak 843 orang. Di samping itu terdapat pula 323 Puskesmas, 491 Puskesmas Pembantu dan 273 apotek.

Masalah yang dirasakan adalah kemampuan pelayanan RSU DT. II yang belum dimanfaatkan masyarakat secara optimal, seperti ratio pemanfaatan tempat tidur baru sekitar 60%, sedangkan RSHS sudah mencapai 91 %.

Lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan penelitian yang cukup banyak di Jawa Barat merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam penemuan-penemuan baru yang diperlukan untuk usaha-usaha pembaharuan dan pembangunan. Di lain pihak hal itu menjadi juga salah satu daya tarik migrasi masuk ke Jawa Barat yang memerlukan perhatian dan penanggulangan yang luwes.

d. Ekonomi.

Laju pertumbuhan nyata ekonomi Jawa Barat selama masa 1975 -- 1981 tercatat rata-rata sebesar 9,47 % per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan per sektor adalah sebagai berikut : sektor industri mencapai sekitar 14,6 %, sektor listrik/gas/air minum sekitar 11,37 %, sektor bangunan/konstruksi sekitar 28,16 %, sektor perdagangan sekitar 9,88 % sektor angkutan/akomodasi sekitar 11,89 %, sektor bank/lembaga keuangan sekitar 18,44 %, serta sektor pemerintah dan hankam sekitar 14,30 % yang dinilai atas dasar harga konstan tahun 1975.

Laju pertumbuhan sektor pertanian hanya mencapai rata-rata 6,38 % per tahun, akan tetapi telah memberikan sumbangan yang terbear terhadap total PDRB yakni sekitar 28,85 %. Besarnya peran sektor pertanian ini banyak diwarnai dan didukung oleh sub sektor pertanian bahan makanan dengan sumbangannya sebesar 21,50 %. Sumbangan kedua terbesar datang dari sektor perdagangan yakni sebanyak 23,30 % dan ketiga terbesar berasal dari sektor industri sebanyak 10,22 %.

Pendapatan per kapita pada tahun 1981 yaitu Rp. 247.315,00 yang dinilai atas dasar harga berlaku. Pembagian pendapatan di Jawa Barat relatif merata. Hal ini ditunjukkan oleh indeks Gini (1981) sebesar 0,2975 untuk kota dan desa (kota 0,2872, desa 0,2617). Pendapatan per kapita tersebut dianggap relatif rendah mengingat masih berada di bawah rata-rata nasional.

Apabila sektor pertanian ditinjau dari segi peranannya dalam PDRB termasuk penyumbang terbesar di samping sektor-sektor lainnya, namun dalam segi pendapatan per pekerja ternyata sektor pertanian memperoleh rata-rata pendapatan per pekerja pada tahun 1981 yang terendah, yaitu sebesar Rp. 122.760,00. Keadaan demikian itu terutama disebabkan oleh masih timpangnya tataniaga pertanian serta belum kuatnya koperasi sebagai lembaga ekonomi pedesaan. Disamping itu kegiatan pasca panen dan pengolahan lanjutan hasil/produksi pertanian oleh industri belum berlangsung dengan baik, kecuali untuk komoditi teh dan kina.

perkembangan pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan di Jawa Barat selama masa tahun 1979 -- 1982 menunjukkan peningkatan.

Luas arena panen padi meningkat sekitar 243 ribu ha selama masa tahun 1969 -- 1981. Pada tahun 1969 tercatat seluas 1,701 juta ha meningkat menjadi 1,944 juta ha pada tahun 1981. Demikian pula hasil rata-rata per hektar padi sawah pada tahun 1969 baru mencapai 26,79 ku/ha meningkat menjadi 38,68 ku/ha pada tahun 1982.

Palawija, kecuali kacang tanah dan kacang hijau, selama masa tersebut luas area panennya berkurang, tetapi hasil rata-rata per hektarnya masih tetap meningkat.

tanaman hortikultura selama masa tersebut perkembangannya cukup baik. Pada tahun 1969 luas area panen sayuran tercatat sekitar 104 ribu ha dengan produksi sekitar 345 ribu ton, dan menurut catatan tahun 1981 luas area panen sayuran meningkat menjadi 136 ribu ha dengan produksi 578 ribu ton atau 29,2 % dari produksi nasional pada tahun yang sama. Tanaman buah-buahan pada tahun 1969 tercatat luas panen sekitar 91 ribu ha dengan produksi 135,8 ribu ton, pada tahun 1981 luas panennya menjadi 132,4 ribu ha dengan produksi 1.494,7 ribu ton atau 28,4 % dari produksi nasional pada tahun yang sama.

Di sub sektor perikanan, selama masa tahun 1978 -- 1982 produksi ikan meningkat dari 138 ton pada tahun 1978 menjadi 219 ton pada tahun 1982. Ini berarti bahwa selama masa tersebut produksi ikan Jawa Barat telah meningkat rata-rata 16,34 % per tahun. Untuk perikanan darat, Jawa Barat merupakan potensi utama dalam skala nasional.

Dalam sub sektor perkebunan, beberapa komoditas dari Jawa Barat menduduki tempat pertama pada skala nasional, seperti teh dan

kina. masalah utama di sub sektor perkebunan yang memerlukan penanggulangan terencana dan terarah adalah masih adanya perkebunan terlantar, baik karena telah habis masa Hak Guna Usahanya (HGU) maupun karena diterlantarkan.

Mengenai sub sektor peternakan, selama masa Pelita III perkembangan populasi ternak pada umumnya meningkat, kecuali ternak kuda, karena berkurangnya fungsi kuda sebagai tenaga penarik/angkutan. Di antara ternak besar, sapi perah merupakan ternak yang populasinya meningkat dengan pesat, hal ini terutama disebabkan karena banyaknya sapi perah yang dimasukkan ke Jawa Barat. Produksi ternak pun selama Pelita III terdapat peningkatan, produksi daging meningkat rata-rata 2,20 % per tahun, telur 3,25 % per tahun dan susu meningkat 20,73 % rata-rata per tahun.

Sektor industri memperoleh pendapatan per pekerja sebesar Rp. 364.800,00 pada tahun 1981. Sektor ini lebih banyak bergerak di bidang industri tekstil, baja dan kimia. Selain itu industri-industri tersebut banyak yang dibangun bersifat padat modal; kemudian hasil produksinya belum banyak diproses lebih lanjut oleh industri-industri kecil, sehingga penyerapan tenaga kerja yang diharapkan akan cukup besar pada sektor industri ini belum berhasil dengan baik.

Kondisi lain yang masih dirasakan sebagai masalah yang cukup besar adalah kegiatan pemupukan modal masyarakat yang masih lemah serta arah pemanfaatan modal masyarakat yang masih cenderung konsumtif.

Kesempatan untuk meningkatkan pendapatan per kapita di Jawa Barat pada masa mendatang sebenarnya masih besar kemungkinannya, mengingat banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal dan terarah, antara lain potensi pariwisata dengan obyek-obyek wisata alam dan kebudayaan khas Jawa Barat yang belum banyak dimanfaatkan. Kemudian besarnya jumlah penduduk Jawa Barat yang memungkinkan pembentukan pasar dalam negeri yang relatif luas bagi pemasaran hasil produksi pertanian, industri kecil/kerajinan, usaha pertambangan dan bahan galian Golongan C. Perlu pula dicatat bahwa rakyat Jawa Barat memiliki semangat wiraswasta yang potensial yang dapat dijadikan andalan bagi pembangunan dimasa mendatang.

e. Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi dalam menjalankan peranannya untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan dan pembangunan di Jawa Barat.

Keadaan tersebut banyak dipengaruhi oleh masalah yang menyangkut kelembagaan, ketata-laksanaan, kepegawaian dan sarana di samping masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum agraria, pertahanan, keamanan, ketertiban masyarakat, peran serta

masyarakat, penerapan dan komunikasi.

Aparatur pemerintah yang ada merupakan potensi bagi terselenggaranya pembangunan secara baik, juga terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu aparatur pemerintah dari tingkat propinsi/kabupaten sampai ke tingkat desa perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga pembangunan, baik yang dirancang pemerintah maupun masyarakat benar-benar dapat dilaksanakan.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berfungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. ABRI sebagai kekuatan sosial berperan selaku dinamisator dan stabilisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya memikul tanggungjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan pembangunan Jawa Barat ialah terwujudnya tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Sesuai dengan hakekatnya maka tujuan pembangunan itu adalah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya di dalam masyarakat "Gemah Ripah Repeh Rapih", yaitu masyarakat adil makmur, yang materiil dan spiritual seimbang yang tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dengan taraf kehidupan, penghidupan, dan lingkungan hidup yang makin meningkat secara merata dan adil, yang akan menjadi landasan yang kuat untuk tahapan pembangunan berikutnya.

Tujuan pembangunan daerah merupakan pemecahan masalah-masalah pokok daerah dan sekaligus merupakan pengisian terhadap tujuan pembangunan nasional.

4. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan Jawa Barat dititikberatkan pada pembangunan ekonomi. Di dalam kerangka pembangunan jangka panjang peranan perekonomian Jawa Barat terhadap nasional dikembangkan melalui intensifikasi dan diversifikasi produksi untuk mewujudkan struktur ekonomi pertanian dan industri yang seimbang.

Intensifikasi dan diversifikasi produksi daerah sawah diusahakan tanpa mengurangi produksi pangan, melalui peningkatan produksi hortikultura, peternakan dan perikanan.

Hal ini akan menimbulkan kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri pengolahan, tataniaga dan sektor pedesaan lainnya. Dalam hubungan ini pengembangan koperasi sebagai wahana modernisasi dan dinamisasi ekonomi rakyat pedesaan/ekonomi lemah sangatlah

penting. Peningkatan orientasi ekonomi koperasi perlu disertai dengan pengembangan keahlian "profesional" di dalam segala bidang.

Arah pembangunan industri ditujukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang, di samping itu juga perlu pertimbangan pemerataan dan kelestarian keseimbangan sumber alam dan lingkungan. Selain itu pembangunan industri sendiri harus mempunyai proporsi yang seimbang. Industri berat yang padat modal di daerah perkotaan diimbangi dengan industri pedesaan yang menggunakan teknologi tepat guna dan bersifat padat karya, sehingga dengan demikian kecenderungan urbanisasi yang merupakan masalah perkotaan bisa dicegah serta keseimbangan bisa terlaksana.

Masalah yang tidak kalah pentingnya ialah mental konsumerisme yang memuja barang impor serta luntarnya hasrat melakukan pekerjaan kasar. Sikap demikian menghambat perkembangan industri dalam negeri dan penurunan produktivitas tenaga kerja, Pendidikan ke arah pengikisan mental yang bersifat negatif ini perlu direncanakan secara terarah dan terpadu.

a. Kebijakan Bidang/sector.

Di dalam kerangka pergeseran struktur ekonomi dari struktur ekonomi agraris menuju struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju didukung oleh kemampuan dan kekuatan pertanian yang tangguh, sektor pertanian sendiri perlu diperkuat dan dimantapkan sehingga dari landasan yang mantap tersebut bisa tumbuh dan berkembang sektor industri yang diharapkan.

Usaha ke arah itu hanya mungkin dicapai oleh Jawa Barat melalui perwilayahan pertanian terpadu yang tidak hanya menggantungkan pada pertanian pangan padi sawah saja tetapi juga pada pertanian pangan non padi, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sebab dengan perwilayahan pertanian terpadu seperti itu akan menjadi jelas arah perkembangan industri, baik yang akan menunjang pertanian maupun yang ditunjang pertanian.

Penataan pertanian secara terpadu akan membuka jalan bagi peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan serta optimalisasi pemanfaatan lahan tanpa mengganggu kelestarian keseimbangannya.

Selain itu, untuk mempercepat perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terpadu dan menyeluruh, pembangunan Bidang Agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya, Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa; serta Bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat perlu ditingkatkan sesuai dan saling menunjang dengan kemajuan di Bidang Ekonomi.

Adapun perincian kebijaksanaan masing-masing bidang adalah

sebagai berikut :

1) Bidang Ekonomi.

- a) Perubahan struktur ekonomi dengan pergeseran secara bertahap dari agraris ke ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri.
- b) Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat khususnya petani, nelayan dan golongan ekonomi lemah.
- c) Perluasan kesempatan kerja terutama di pedesaan sehingga jumlah penganggur makin berkurang dan tekanan tenaga kerja terhadap pertanian makin ringan.
- d) Peningkatan produksi dan persediaan pangan, sandang dan papan dalam jangkauan daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.
- e) Peningkatan, pengembangan dan pembinaan dunia usaha terutama koperasi sebagai wahana modernisasi dan dinamisasi ekonomi rakyat pedesaan/ekonomi lemah.
- f) Peningkatan kondisi prasarana dan perhubungan sehingga mengalami kemajuan secara fungsional.
- g) Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan lahan, tata ruang, tata guna lahan serta tata pemilikannya secara optimal dalam pembangunan sosial ekonomi dengan tetap memperhatikan terjaminnya kelestarian keseimbangan sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.

2) Bidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

- a) Peningkatan mental masyarakat yang baik, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur kreatif, dinamis dan bertanggungjawab.
- b) Pemerataan dan peningkatan taraf pendidikan masyarakat serta penekanan persentase buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar terutama kelompok usia sekolah dasar dan peningkatan keterampilan serta keahlian menengah kelompok umur angkatan kerja.
- c) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat dalam arti daya tahan terhadap penyakit makin tinggi, penyakit menular terberantas dan peningkatan harapan hidup.
- d) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta penyebarannya yang seimbang.
- e) Pembinaan jiwa juang generasi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang Pancasila.
- f) Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara adil dan merata.

3) Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa.

- a) Bertambah bersih, tertib, kuat, mampu dan berwibawanya aparatur pemerintah di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b) Peningkatan pembinaan keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan kebijaksanaan antar aparatur negara.
- c) Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pemerintahan.
- d) Peningkatan kemampuan pemerintahan desa sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- e) Pembinaan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan teratur, disertai meluasnya partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan.
- f) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat dan peningkatan tegaknya peraturan-peraturan daerah.
- g) Penumbuhan serta pengembangan kesadaran hukum, kesadaran politik, kesadaran bermasyarakat, kesadaran atas pentingnya keserasian lingkungan hidup, kesadaran beragama, dan kesadaran bernegara yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- h) Peningkatan penggalan sumber-sumber dana melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi.
- i) Penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber dana secara berhasilguna dan berdayaguna.

4) Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- a) Pembinaan kesadaran yang lebih mantap tentang hakekat pertahanan keamanan negara secara baku dan melembaga.
- b) Peningkatan kesadaran peran serta masyarakat dalam sistim bela negara.
- c) Peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme subversif dan bentuk kejahatan lainnya.
- d) Peningkatan memasyarakatnya pengertian dwifungsi ABRI.

b. Kebijakan Spatial.

Wilayah Pembangunan di Jawa Barat direncanakan berdasarkan pendekatan sistim administrasi pemerintahan, aliran sungai, aliran barang dan orang, di samping itu memperhatikan pula ciri-ciri khas dari masing-masing wilayah pembangunan dengan struktur dan hierarki perkotaannya.

Dengan pendekatan tersebut di atas Jawa barat di bagi menjadi 7 wilayah pembangunan. Dari pengamatan selama Pelita II dan Pelita III, maka pembagian atas tujuh wilayah pembangunan tersebut masih konsisten untuk dipakai dalam masa yang akan datang, disertai pendekatan pembangunan Jawa Barat bagian selatan secara bijaksana sesuai dengan potensi dan permasalahannya.

Kebijaksanaan spatial setiap wilayah pembangunan diarahkan sebagai berikut :

- 1) Wilayah Pembangunan Banten (Serang, Pandeglang, Lebak) :
 - a. Pusat pengembangan utama : Cilegon dan sekitarnya.
 - b. Pusat pengembangan kedua : Malingping, Labuan dan Rongkasbitung.
 - c. Bagian utara ditamakan untuk perluasan dan intensifikasi pesawahan teknis dan bagian selatan untuk perkebunan, tanaman buah-buahan dan kehutanan.
 - d. Teluk Lada diperuntukkan intensifikasi usaha, pertanian dan perikanan.
 - e. Daerah sekitar Cilegon dijadikan pusat industri berat dengan fasilitas pendukungnya.
 - f. Pariwisata dikembangkan sesuai dengan potensinya.

- 2) Wilayah Pembangunan Botabek (Bogor, Tangerang, Bekasi).

Dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada sebagai daerah penyangga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, wilayah ini diarahkan sebagai berikut :

- a) Pusat pengembangan utama : Jakarta
- b) Pusat pengembangan kedua : Balaraja, Bogor, Cikarang.
- c) Sekitar DKI dipersiapkan untuk menampung industri yang dilengkapi fasilitas penunjang perkembangan industri, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
- d) Beberapa daerah dipertahankan sebagai daerah hijau yang produktif dan sumber air.
- e) Beberapa bagian dipersiapkan untuk daerah pemukiman.
- f) Angkatan kerja di wilayah ini dipersiapkan sebagai tenaga terampil perkotaan.

- 3) Wilayah Pembangunan Sukabumi (Sukabumi).

- a) Pusat pengembangan utama : Sukabumi.

- b) Pusat pengembangan kedua : Cibadak/Nagrak, Sagaranten dan Pelabuhanratu.
 - c) Memanfaatkan pengembangan Pelabuhanratu sebagai pelabuhan.
 - d) Pengembangan wilayah ini ditekankan pada bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata.
- 4) Wilayah Pembangunan Purwasuka (Purwakarta, Subang, Karawang).
- a) Pusat pengembangan utama : Cikampek.
 - b) Pusat pengembangan kedua : Purwakarta, Karawang, Subang dan Pamanukan.
 - c) Daerah Jatiluhur dijadikan basis pengembangan.
 - d) Titik berat pengembangannya adalah produksi pangan melalui intensifikasi dan diversifikasi usaha tani serta pengembangan industri yang mendukung pertanian.
- 5) Wilayah Pembangunan Bandung Raya (Bandung, Cianjur, Garut, Sumedang).
- a) Pusat pengembangan utama : Bandung.
 - b) Pusat pengembangan kedua : Cianjur, Sumedang dan Garut.
 - c) Wilayah ini dipersiapkan untuk kegiatan pemerintahan, pusat pendidikan tinggi, perdagangan, industri, dan pariwisata.
 - d) Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat serta pusat pengembangan perlu penambahan dan penyempurnaan fasilitas-fasilitas perkotaan.
 - e) Pengembangan pertanian dan di daerah hulu daerah-daerah aliran sungai sejauh mungkin dipertahankan adanya daerah konservasi, serta tanah-tanah kritis direhabilitasi/direboisasi.
- 6) Wilayah Pembangunan Cirebon (Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka)
- a) Pusat pengembangan utama : Cirebon.
 - b) Pusat pengembangan kedua : Jatibarang, Kuningan dan Kadipaten.
 - c) Pengembangan perindustrian, perdagangan dan pertanian serta pariwisata.
 - d) Industri yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan ialah industri pengolahan hasil pertanian dan industri kimia.
 - e) Cirebon sebagai pusat pengembangan dilengkapi berbagai disilitas, terutama pengembangan pelabuhan.

- 7) Wilayah Pembangunan Priangan Timur (Tasikmalaya, Ciamis).
- a) Pusat pengembangan utama : Tasikmalaya.
 - b) Pusat pengembangan kedua : Banjar.
 - c) Memanfaatkan pengembangan DAS Citanduy dan pelabuhan Samudra Cilacap.
 - d) Pengembangan daerah pertanian, perkebunan dan perikanan, serta pertambangan/galian.
 - e) Di beberapa daerah dibina serta dikembangkan industri pengolahan hasil pertanian, industri kerajinan rakyat, dan pariwisata.

5. CATATAN DASAR.

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Jawa Barat merupakan landasan bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan daerah jangka menengah, yaitu Pola Umum Pelita yang merupakan dasar bagi penyusunan Repelita Daerah.

BAB III

POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
KEEMPAT DAERAH

1. PENDAHULUAN.

Pola Umum Pelita IV Daerah Jawa Barat merupakan penjabaran dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan merupakan dasar bagi penyusunan Repelita IV Daerah yang memberikan arah kebijaksanaan sektor/sub sektor dan program pembangunan untuk kurun waktu dari tahun 1984/1985 sampai dengan tahun 1988/1989.

Pelita IV bertumpu dan berkesinambungan dengan Pelita-pelita sebelumnya, baik dari segi konsepsinya, pendekatan, proses maupun materinya.

Dari segi materi, masalah-masalah yang belum terpecahkan selama masa sebelumnya akan diusahakan untuk dipecahkan di dalam Pelita IV, sehingga masalah pokok Pelita IV bukan hanya masalah yang dihadapi di masa lima tahun mendatang tetapi juga masalah yang belum sempat diselesaikan pada masa sebelumnya.

Masalah-masalah pokok tersebut adalah sebagai berikut : masalah mutu sumber daya manusia antara lain terdiri dari nilai budaya yang belum mendukung pembangunan masih ada, seperti mental konsumerisme, kurang menghargai produksi dalam negeri dan menghindari kerja kasar; daya tampung sekolah menengah masih terbatas; kesehatan masyarakat dan lingkungan masih rendah dan masih sensitif endemi.

Masalah perluasan kesempatan kerja antara lain terdiri dari : keterampilan angkatan kerja terutama di pedesaan masih rendah, efisiensi kerja terutama di pedesaan relatif masih kurang; mekanisme pasar kerja masih belum berjalan lancar; koordinasi

perencanaan tenaga kerja di daerah dan koordinasi latihan tenaga kerja masih kurang.

Masalah pengembangan lembaga ekonomi terutama koperasi antara lain terdiri dari : koperasi masih belum berfungsi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya; semangat wira usaha golongan ekonomi lemah masih belum berkembang; posisi koperasi dalam kegiatan ekonomi masih belum kuat bila dibandingkan dengan lembaga usaha lainnya.

Masalah pendayagunaan aparatur pemerintah antara lain terdiri dari : luas wilayah serta banyaknya penduduk tidak seimbang dengan wilayah administrasi, baik untuk daerah tingkat II, kecamatan maupun untuk desa; jumlah dan kemampuan aparatur belum memenuhi standar yang dibutuhkan oleh tugas dan fungsinya; sarana dan prasarana fisik pemerintahan terutama di tingkat kecamatan dan desa masih kurang; perencanaan personil pemerintah di daerah belum mantap.

Masalah ketimpangan antara pemanfaatan dengan pelestarian keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan antara lain terdiri dari : daya dukung sumber daya alam dan lingkungan cenderung semakin menurun; perkembangan kota dan desa kurang terencana dan kurang terarah; penggunaan dan penguasaan/pemilikan tanah kurang terkendali; pengamatan pencemaran lingkungan dan usaha pencegahannya masih belum efektif.

Dalam pelaksanaan Pelita keempat akan ditempuh kebijaksanaan yang merupakan penerapan kebijaksanaan nasional yang disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan pokok di daerah yaitu Lima Kebijaksanaan Strategis Jawa Barat sebagai berikut : kebijaksanaan peningkatan mutu sumber daya manusia; kebijaksanaan perluasan kesempatan kerja yang wajar terutama di daerah pedesaan; kebijaksanaan perluasan dan pengembangan lembaga-lembaga ekonomi terutama koperasi; kebijaksanaan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah; kebijaksanaan dalam pemanfaatan dengan kelestarian keseimbangan sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.

2. TUJUAN PELITA IV DAERAH.

Pertama :Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil dengan penekanan sebagai berikut :

- (1)pendapatan per kapita makin meningkat dan makin merata,
- (2)perkembangan industri dan pertanian makin seimbang,
- (3)komoditas ekspor non migas makin meningkat dan berkembang, baik jenisnya maupun kualitasnya,

- (4) sistim tataniaga makin menguntungkan, bagi produsen maupun konsumen,
- (5) kelembagaan ekonomi terutama koperasi makin berkembang,
- (6) pemupukan modal masyarakat makin meningkat,
- (7) sistim perkreditan di pedesaan lebih menunjang perkembangan perekonomian pedesaan,
- (8) sektor ekonomi di pedesaan makin berkembang,
- (9) kesempatan kerja makin meluas,
- (10) keterampilan angkatan kerja makin meningkat,
- (11) jaminan sosial masyarakat makin meningkat,
- (12) mutu sekolah dasar makin meningkat dan anak usia sekolah menengah makin banyak yang tertampung,
- (13) mental masyarakat yang baik makin mantap, dan keimanan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin meningkat,
- (14) unsur-unsur kebudayaan daerah yang mendukung pembangunan lebih termanfaatkan,
- (15) kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan makin meningkat.

Kedua: Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya dengan penekanan sebagai berikut :

- (1) tingkat pertumbuhan penduduk makin menurun,
- (2) penyebaran penduduk, baik antar daerah maupun antara kota dan desa makin seimbang,
- (3) tata ruang dan tata guna lahan serta pemilikan lahan pertanian makin teratur dan makin baik,
- (4) sumber-sumber daya alam, hutan, tanah, dan air serta prasarana pengairan makin bermanfaat dan lestari,
- (5) kemampuan pelayanan prasarana perhubungan makin meningkat,
- (6) kondisi obyek pariwisata Jawa Barat sebagai salah satu tujuan utama pariwisata nasional makin mantap,

- (7) lingkungan perkotaan, pemukiman di pedesaan dan lingkungan industri serta kebutuhan fasilitas dan utilitasnya makin baik,
- (8) wilayah administrasi kabupaten/kotamadya daerah tingkat II, kota administratif, kecamatan dan desa/kelurahan ditata kembali sesuai dengan kebutuhan,
- (9) kemampuan dan jumlah aparatur pemerintah Daerah makin meningkat,
- (10) sumber-sumber pendapatan asli daerah makin banyak dan makin meluas,
- (11) kekuatan rakyat makin terlatih dan terorganisasikan.

3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang maka dalam Pelita IV Daerah Jawa Barat, prioritas ditekankan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan industri melalui pemningkatan mutu sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pengembangan koperasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah dengan menjaga kelestarian keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi maka pembangunan bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, agama, makin ditingkatkan sesuai dan saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam rangka menumbuhkan percepatan pembangunan Jawa Barat maka kepada Wilayah Jawa Barat bagian Selatan diberikan prioritas tanpa mengabaikan aspek pemerataan bagi daerah dan wilayah pembangunan lainnya.

4. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN.

Dalam kerangka perubahan struktur ekonomi daerah dari ekonomi agraris ke ekonomi yang seimbang antara pertanian dan industri, pembangunan selama pelita IV di daerah Jawa Barat diprioritaskan pada Bidang Ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan industri melalui lima kebijaksanaan strategis yang penjabarannya lebih lanjut diarahkan dalam kebijaksanaan Bidang/Sektor dan kebijaksanaan Spatial.

Lima kebijaksanaan strategis Jawa barat tersebut merupakan penerapan kebijaksanaan nasional di Daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi di daerah selama kurun waktu Pelita IV.

Di dalam lima kebijaksanaan strategis tersebut terkandung kebijaksanaan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional/Regional yang dinamis (Trilogi Pembangunan) dengan delapan jalur pemerataannya.

Dengan demikian kebijaksanaan di dalam empat bidang dan di tujuh wilayah pembangunan harus mengandung lima kebijaksanaan strategis yang telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan spesifik di dalam bidang dan wilayah yang bersangkutan.

Adapun kebijaksanaan pada setiap bidang dan di setiap wilayah pembangunan secara spesifik adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Bidang/Sektor.

Penerepan kebijaksanaan bidang ke dalam sektor merupakan usaha operasionalisasi dan kongkritisasi kebijaksanaan yang akan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) keempat.

Kebijaksanaan di setiap sektor pembangunan selain harus berwawasan lima kebijaksanaan strategis juga harus saling berkaitan dan saling menunjang.

Adapun kebijaksanaan di setiap bidang/sektor pembangunan adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang Ekonomi.
 - a) Pertanian.
 - (1) Peningkatan produksi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
 - (2) Penyusunan rencana perwilayahan pertanian dan kehutanan.
 - (3) pemantapan penyuluhan pertanian terpadu melalui pemantapan sistim wilayah unit desa/wilayah kerja penyuluhan pertanian dan kehutanan
 - (4) Pengembangan usaha tunai/nelayan sesuai dengan kemampuan wilayah.
 - (5) Peningkatan keikutsertaan petani/nelayan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian melalui kelompok-kelompok tani/nelayan dan Koperasi-koperasi Unit Desa.
 - (6) Peningkatan pengembangan usaha pertanian rayat dengan dorongan dan bantuan perusahaan pertanian yang besar.
 - (7) Peningkatan pemanfaatan potensi hutan dalam upaya meningkatkan pendapatan Negara, masyarakat dan daya dukung lingkungan hidup.

- (8) Pengendalian lajunya penyempitan pemilikan lahan pertanian dan di lain pihak mengusahakan tercapainya konsolidasi pemilikan lahan pertanian.
- (9) Pengelolaan (perencanaan, pengawasan/pengendalian pemanfaatan) potensi-potensi sumber-sumber air hingga tercapai dayaguna dan hasil guna optimal untuk keperluan air minum, pertanian, teknik penyehatan, pariwisata, pembangkit tenaga listrik, industri dan lain-lain.
- (10) Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan dan bangunan irigasi yang ada serta peningkatan pengelolaannya sehingga tercapai dayaguna dan hasil guna optimal.
- (11) Pengamanan sungai antara lain dengan pelurusan, pembuatan dan perbaikan tanggul, pengerukan, pembuatan pelimpahan serta pengelolaan bangunan-bangunan serbaguna dan prasarana pengairan yang juga berfungsi sebagai pengendali banjir.
- (12) Perluasan dan pembangunana jaringan irigasi baru pada daerah yang memungkinkan dengan mengadakan penelitian terutama untuk kemungkinan pembukaan tanah persawahan baru di daerah rawa-rawa dengan sistim pelumpuran (kolmatasi).
- (13) Pembangunan bendung-bendung, waduk serba guna pada beberapa aliran sungai yang potensial.

b) Industri.

- (1) Pengembangan industri dengan laju yang dipercepat.
- (2) Penataan kawasan industri didasari pertimbangan usaha pengembangan wilayah pertanian dan pengembangan perkotaan.
- (3) Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat secara terpadu dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki masyarakat dan pengalihan teknologi melalui sistim "bapak angkat".
- (4) Pengembangan industri yang menghasilkan mesin, alat dan sarana pertanian serta industri pengolahan hasil pertanian

terutama di daerah pedesaan.

c) Pertambangan dan Bahan Galian.

- (1) Usaha pertambangan dan bahan galian diusahakan oleh rakyat dengan teknologi tepat guna.
- (2) Beberapa jenis usaha pertambangan yang tidak memungkinkan diusahakan oleh rakyat diarahkan untuk diusahakan oleh Perusahaan Negara.
- (3) Teknologi penambangan dan penggalian harus memenuhi persyaratan keselamatan manusia dan menjamin kelestarian sumber daya alam dan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.

d) Energi.

- (1) Pengembangan sumber energi yang ada di samping tenaga air, antara lain tenaga uap, panas bumi dan batu bara.
- (2) Penggunaan energi listrik selain diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan industri juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumen seluas mungkin.
- (3) Percobaan pengembangan penggunaan sumber dan teknologi energi murah yang sesuai dengan potensi pedesaan.

e) Perhubungan.

- (1) Pembangunan baru, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dalam sistim koordinasi inter modal antara perhubungan darat, laut dan udara dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan daerah dalam rangka mendukung pembangunan secara keseluruhan.
- (2) Perhubungan darat yang terdiri dari angkutan jalan raya dan angkutan kereta api diarahkan selalu pada fungsi pelayanannya. Oleh karena itu perlu terjamin kondisi yang baik dengan memperhatikan pemeliharaan, rehabilitasi dan eksploitasi serta penggunaan jalan raya tidak melebihi kemampuannya.
- (3) Perhubungan udara diarahkan pada pembangunan

baru, peningkatan pelabuhan-pelabuhan udara komersial yang terpisahkan dari kegiatan Hankam, sehingga dapat memperlancar perhubungan udara antar daerah serta dan ke daerah lain di luar Jawa Barat.

(4) Perhubungan laut diarahkan pada pembangunan baru dan peningkatan pelabuhan-pelabuhan di pantai Laut Jawa Samudra Hindia dan Selat Sunda yang memadai untuk perhubungan inter insuler dan samudra.

(5) Pembangunan baru, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pos dan Telekomunikasi secara optimal yang diarahkan sedemikian rupa sehingga saling menunjang, mengisi dan melengkapi pada sistim perhubungan dalam rangka memperluas jangkauan komunikasi dan menunjang ruang lingkup kehidupan masyarakat.

f) Pariwisata.

(1) Pengembangan Pariwisata diarahkan melalui peningkatan mutu pelayaann jasa pariwisata dan jasa penunjangannya dengan tetap memelihara budaya bangsa.

(2) Pembinaan pelestarian dan promosi obyek-obyek pariwisata dilakukan dengan perkembangan kepariwisataan.

(3) Pengembangan potensi wisata remaja dikaitkan dengan pendidikan cinta alam, lingkungan dan tanah air pada umumnya serta merangsang minat penelitian dan keperintisan.

g) Perdagangan.

(1) Peningkatan pengetahuan, motivasi dan keterampilan pedagang melalui latihan dan penyuluhan yang lebih terencana dan terarah pada perluasan wawasan dunia perdagangan terutama untuk pengusaha golongan ekonomi lemah.

(2) Penyempurnaan lembaga-lembaga perdagangan dan pemasaran serta sistim tataniaga antara lain melalui usaha pemasaran bersama "marketing board" dan lebih memberikan kesempatan kepada usaha-usaha perkoperasian.

(3) Penyempurnaan upaya-upaya perlindungan

terhadap konsumen dan produsen termasuk pelayanan kemetrollogian serta hak paten.

h) Koperasi.

- (1) Peningkatan usaha memasyarakatkan kehidupan perkoperasian di Jawa Barat melalui pelayanan penyuluhan, bantuan fasilitas dan kesempatan berusaha.
- (2) Peningkatan kewiraswastaan, pengetahuan dan keterampilan pimpinan usaha koperasi, sehingga mempunyai kemampuan berusaha yang setaraf dengan lembaga ekonomi lainnya.
- (3) Pemantapan fungsi koperasi dan pembinaan anggota agar berperan serta dalam kegiatan perkoperasian dan pembinaan usaha koperasi.
- (4) Pemantapan peran koperasi sebagai wahana modernisasi dan dinamisasi ekonomi rakyat melalui penyuluhan kesadaran berkoperasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparat pembinaannya.

i) Dunia Usaha dan Golongan Ekonomi Lemah.

- (1) Pengembangan kerja sama yang serasi antara golongan usaha besar, menengah, kecil dan koperasi dengan semangat saling menguntungkan.
- (2) pemantapan peranan kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembinaan dunia usaha terutama golongan ekonomi lemah.
- (3) Perluasan kesempatan memanfaatkan perkreditan kepada golongan ekonomi lemah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- (4) Peningkatan semangat kewiraswastaan, kemampuan dan keahkliaan golongan ekonomi lemah, baik melalui latihan maupun pemberian kesempatan berusaha.

j) Tenaga Kerja.

- (1) peningkatan kemampuan, baik pengetahuan, ketrampilan maupun semangat wiraswasta tenaga kerja, disesuaikan dengan lapangan kerja, baik yang tersedia maupun yang akan diciptakan.

- (2) Perluasan kesempatan kerja melalui berbagai usaha peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
- (3) Pembinaan kelembagaan tenaga kerja/buruh dalam rangka mencapai hubungan perburuhan Pancasila.
- (4) Perlindungan terhadap tenaga kerja/buruh wanita sesuai dengan kehormatan, martabat dan kodratnya sebagai wanita.

k) Transmigrasi.

- (1) Peningkatan usaha transmigrasi diutamakan dari daerah padat penduduk, daerah kritis, daerah bencana alam, daerah konservasi/cagar alam dan daerah yang terkena proyek, ke daerah yang fisik geografisnya relatif tidak begitu berbeda dengan daerah lainnya.
- (2) Transmigrasi dari daerah Jawa Barat diusahakan berorientasi kepada penyediaan lapangan kerja dan pada peningkatan kesejahteraannya.
- (3) Pelaksanaan transmigrasi dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu.

l) Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

- (1) Pengembangan kota dan desa yang semakin terarah dan terencana dalam rangka pengembangan perwilayahan.
- (2) Penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan atas dasar rencana tata ruang yang mantap, selain itu diusahakan pula terbentuknya persepsi yang sama terhadap perundang-undangan dan peraturan yang ada mengenai perencanaan tata ruang.
- (3) Penyempurnaan sistim perencanaan pembangunan dengan mengaitkan fungsi perencanaan dengan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dari tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya sampai desa.
- (4) Penunjangan program pembangunan nasional di daerah.
- (5) Pengembangan dan peningkatan peran dan fungsi

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai sasaran dan wahana pembangunan masyarakat pedesaan.

m) Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

- (1) Pemantapan pola penggunaan dan pengelolaan lahan yang sesuai dengan kelas kesesuaiannya dan peruntukannya, baik untuk kegiatan pertanian maupun kegiatan non pertanian.
- (2) Penanggulangan lahan kritis dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis dalam rangka konservasi sumber daya alam, tanah dan air.
- (3) Peningkatan keserasian lingkungan daerah perkotaan dan pedesaan sehingga lebih baik.
- (4) Membantu usaha-usaha Pemerintah Pusat dalam kegiatan-kegiatan penelitian, pemetaan geologi, eksplorasi dan eksploitasi bahan-bahan mineral strategis serta vital dan gas bumi.
- (5) Meneliti, mengusahakan, memanfaatkan bahan mineral strategis serta vital, diarahkan menjadi hasil produksi yang berbentuk bahan jadi untuk ekspor dan keperluan dalam negeri.

2) Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

a) Agama.

- (1) Peningkatan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta peningkatan amal pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama sebagik-baiknya bagi para pemeluknya dan pemeliharaan serta pembinaan kerukunan hidup umat beragama, baik di lingkungan Agama masing-masing maupun antar umat beragama dan antar umat beragama dengan Pemerintah.
- (3) Penyediaan sarana peribadatan yang cukup memadai bagi masyarakat tiap lingkungan dengan memperhatikan ketepatan lokasi dalam lingkungannya.

- (4) Pembinaan aparatur pembina bidang keagamaan ditingkatkan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sesuai dengan meningkatnya jumlah dan kemajuan cara berpikir para penganut agama serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) penyempurnaan sistim pengelolaan dana keagamaan yang berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, masyarakat sendiri maupun bantuan dari luar negeri.
- (6) Pembinaan kelembagaan kehidupan umat beragama dan pembinaan sarana-sarana fisik keagamaan sehingga terkoordinasikan dan termanfaatkan secara berhasilguna dan berdayaguna.
- (7) Pembinaan pendidikan keagamaan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui sekolah, pesantren, majelis taklim dan perorangan hendaknya mampu juga memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
- (8) Pendidikan guru agama dikembangkan sehingga memungkinkan lulusannya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di samping kemungkinan mendapatkan kesempatan kerja.
- (9) Penyediaan buku-buku agama dan keagamaan dan pengadaan kitab suci untuk memantapkan pemahaman ajaran agama di kalangan pemeluk agama.
- (10) Penyempurnaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk kelancaran pelaksanaannya.

b) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan pada usaha agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak mengarah pada pembentukan agama baru.

c) Pendidikan.

- (1) Melalui pengembangan ilmu dan teknologi

diusahakan agar pendidikan mendorong perubahan kearah masyarakat yang lebih rasional dan demokratis serta dapat berdiri sendiri sesuai dengan kepribadian bangsa.

- (2) Pemberantasan buta aksara dan angka, buta Bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar, baik untuk orang dewasa maupun para penyandang cacat di samping peningkatan daya tampung usia sekolah disertai kewajiban belajar bagi anak-anak usia sekolah.
- (3) Peningkatan daya tampung kelanjutan sekolah menurut tingkat pendidikan yang diperlukan dan pengembangan pendidikan kejuruan serta kursus keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dihadapi pada tahap-tahap berikutnya.
- (4) Pembinaan pendidikan tinggi diarahkan pada usaha peningkatan daya tampung terutama melalui pembinaan perguruan tinggi swasta yang memenuhi persyaratan.
- (5) Perluasan dan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi terutama dalam hubungannya dengan penggalan dan pengembangan potensi daerah melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat antara lain melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang lebih dititikberatkan pada usaha memotivasi masyarakat pedesaan untuk percepatan pembangunan di desa.
- (6) Perluasan pendidikan luar sekolah yang mempunyai nilai prospektif dalam hubungannya dengan arah perkembangan kehidupan perekonomian daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- (7) Pemantapan koordinasi antar instansi penyelenggara/penanggung jawab pendidikan lebih dimantapkan serta berupaya meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah bertanggungjawab dalam bidang pendidikan.
- (8) Peningkatan jumlah dan mutu kepustakaan, penerbitan, penulisan dan penerjemahan buku-buku dan terbitan lainnya yang dapat

lebih menunjang pendidikan dan pembangunan bangsa.

- (9) Peningkatan prasarana keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan, di samping Pemerintah.

d) Kebudayaan.

- (1) Penciptaan iklim yang memberi keleluasaan kepada seniman dan budayawan untuk mengembangkan karsa dan karyanya secara sehat dan bertanggungjawab.

- (2) Pembinaan dan pengembangan bahasa Sunda sebagai "bahasa ibu", alat komunikasi dalam keluarga, masyarakat dan potensi dalam pembentukan pribadi yang luhur.

- (3) Penelitian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah secara intensif diarahkan kepada ketahanan kepribadian bangsa.

- (4) Penggalan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan serta kesenian rakyat di daerah dan mencegah pengaruh atau penyusupan unsur-unsur kebudayaan asing yang negatif.

- (5) Pemeliharaan dan pembinaan keutuhan peninggalan sejarah budaya masyarakat serta inventarisasi biografi tokoh-tokoh budayawan Jawa Barat yang dapat menjiwai kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan kebudayaan Nasional.

Tempat-tempat peninggalan sejarah yang mempunyai nilai kebanggaan-kebesaran daerah dan bangsa perlu mendapatkan perlindungan serta pemeliharaan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

- (6) Pembangunan pusat-pusat pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah dalam wujud taman budaya, pagelaran-pagelaran kesenian daerah, baik yang hampir punah maupun yang sedang berkembang, dan pemanfaatan peninggalan sejarah untuk pendidikan serta kepariwisataan.

e) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan penelitian.

- (1) Perluasan kesempatan untuk terselenggaranya

kegiatan penelitian dan percobaan di bidang pengetahuan sosial, ekonomi dan teknologi terutama teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan serta prospek pengembangannya dan prioritas pembangunan.

(2) Penyelenggaraan usaha yang merangsang minat dan kreativitas remaja dalam menghasilkan karya ilmiah dan mendalami sejarah perjuangan bangsa.

f) Kesehatan.

(1) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat terutama masyarakat pedesaan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui berbagai upaya kesehatan antara lain : penyuluhan kesehatan, usaha perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular, imunisasi, penyebaran penyediaan pusat pelayanan kesehatan ke desa-desa dan penyediaan segala fasilitas yang diperlukan, pengendalian pengadaan dan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan.

(2) Peningkatan kesadaran dan kemampuan hidup sehat dan terciptanya lingkungan hidup yang serasi dan sehat dalam masyarakat serta peningkatan peran serta masyarakat.

(3) Pemberantasan penyakit yang bersifat epidemis harus mendapat perhatian seksama sehingga tidak mengakibatkan wabah.

(4) Peningkatan sistim pelayanan rujukan, antara lain mengusahakan setiap daerah tingkat II mempunyai rumah sakit umum. Rumah sakit dengan klasifikasi tertinggi di wilayahnya dijadikan sebagai pusat rujukan rumah sakit sekitarnya.

Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai pusat rujukan untuk tingkat propinsi di Jawa barat ditingkatkan fasilitasnya.

(5) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta peningkatan kesempatan pelayanannya kepada masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan mutlak perlu.

(6) Peningkatan upaya kesehatan keluarga sebagai unit masyarakat terkecil dengan harapan dapat lebih meningkatkan pelayanan dan

pemerataan kesehatan masyarakat.

g) Kependudukan dan Keluarga Berencana.

(1) Pengendalian penambahan penduduk.

Penurunan tingkat kelahiran melalui peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program keluarga berencana sehingga penambahan penduduk secara alami terkendalikan. Di samping itu dilakukan pengendalian migrasi masuk melalui pengisian lapangan kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja setempat, serta peningkatan migrasi ke luar melalui usaha transmigrasi.

(2) Penyebaran penduduk yang seimbang.

Penyebaran penduduk diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung masing-masing daerah tingkat II melalui penyebaran tenaga kerja yang sesuai untuk memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang bersangkutan. Sedangkan perpindahan penduduk dari desa ke kota dilakukan dalam kerangka pengisian kesempatan kerja di sektor non pertanian, serta memperingan tekanan kerja terhadap sektor pertanian.

h) Perumahan dan Pemukiman.

(1) Penyediaan perumahan rakyat di perkotaan dan pedesaan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas perumahan sehat, kuat dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, sesuai dengan taat ruang yang ditunjang prasarana fisik, fasilitas dan utilitas.

(2) Menggalakkan industri perumahan sederhana dan industri bangunan di kota melalui pembangunan perumahan oleh swasta.

(3) Perencanaan pemukiman harus selalu dikaitkan dengan perencanaan kota dan desa.

(4) Perbaikan dan penyempurnaan pemukiman rakyat tidak hanya pada pemukiman yang telah ada, tetapi di samping itu dilakukan pemukiman kembali.

i) Kesejahteraan Sosial.

(1) Pembinaan keluarga miskin untuk menumbuhkan kepercayaan kepada dirinya sendiri dalam

rangka meningkatkan produktivitas serta peran sertanya dalam pembangunan.

- (2) Pemeliharaan dan penyantunan sosial bagi orang-orang lanjut usia yang tidak mampu, orang-orang terlantar, fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan para penyandang cacat serta rehabilitasi orang-orang tersebut dalam rangka mengatasi kekurangan dan permasalahannya untuk dapat hidup wajar dan layak di masyarakat.
- (3) Meningkatkan pembinaan Veteran Pejuang Kenyangkut kesejahteraan, maupun upaya partisipasi menyangkut kesejahteraan, maupun upaya partisipasinya dalam pembangunan.
- (4) Bantuan dan rehabilitasi sosial dalam rangka menanggulangi masalah korban bencana alam, dilaksanakan secara terpadu dan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan panti-panti sosial yang memadai bagi para santunan sosial.
- (6) Menumbuhkan dan membina pekerja-pekerja sosial sukarela yang sadar dan bertanggungjawab dan meningkatkan peranan organisasi sosial dalam menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

j) Generasi Muda.

- (1) Pencegahan timbulnya kesenjangan pertautan antar generasi dengan mengadakan kegiatan pendidikan termasuk pendidikan agama dan pengembangan ilmu pengetahuan ke arah pembentukan watak generasi muda sebagai generasi pejuang dan penerus bangsa, serta pendidikan yang membentuk motif berprestasi termasuk sikap menghargai kerja kasar.
- (2) Pewarisan nilai-nilai budaya dan perjuangan bangsa kepada pemuda/generasi muda dengan mempersiapkan kader-kader pemimpin kemudian hari, dan pemberian peranan dalam proses pembangunan di satu pihak, sedang di pihak lain pencegahan tumbuhnya unsur-unsur negatif yang akan menghancurkan moral dan mental pemuda/generasi muda.

(3) Penciptaan iklim yang sehat yang memungkinkan kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan bertanggungjawab, antara lain : pendirian gelanggang remaja/karang taruna, pusat-pusat perkemahan, desa pemuda dan tempat rekreasi, serta menyelenggarakan berbagai aktivitas pemuda seperti pemeragaan, dan kegiatan lapangan lainnya.

k) Olahraga.

(1) Pelaksanaan usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, kesegaran keterampilan, dinamika dan gairah hidup.

(2) Pengembangan bibit olahragawan, baik di sekolah-sekolah maupun dalam lingkungan-lingkungan masyarakat melalui kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri, guna mencapai prestasi keolahragaan, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

(3) Penyediaan pembina olahraga, sarana dan prasarana olahraga secara baik, terencana serta terjamin pemeliharaannya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

l) Peranan Wanita dalam Pembangunan bangsa.

(1) Peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan kaum wanita sehingga mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan tanpa mengabaikan sifat-sifat kodrati kewanitaannya.

(2) Peningkatan rasa percaya diri dan tanggungjawab wanita dalam melaksanakan peran gandanya, sebagai ibu rumah tangga dan wanita yang berkarya bagi masyarakat serta dalam hubungannya dengan usaha-usaha pembinaan bangsa, sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta kebutuhan lingkungan sosialnya.

(3) Pengembangan peranan wanita dalam pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) sangat menentukan perkembangan generasi muda sebagai manusia pembangunan masa kini dan

masa yang akan datang.

3) Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa.

a) Politik.

(1) Pembangunan di bidang Politik, dilakukan melalui usaha untuk memantapkan penghayatan dan meningkatkan pengamalan Pancasila dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama dilakukan dengan jalan lebih menyebarluaskan P-4 di kalangan masyarakat.

Untuk itu perlu pula dilakukan usaha evaluasi di dalam usaha mencari/mendapatkan metode dan cara yang paling tepat.

(2) Penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara bagi seluruh tingkat dan lapisan masyarakat.

(3) Peningkatan kemampuan supra dan infra struktur politik agar lebih tanggap terhadap aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Untuk itu di lingkungan supra struktur politik perlu diadakan usaha-usaha peningkatan kemampuan dan kecakapan serta disiplin aparatur sehingga akan terwujud suatu Pemerintahan yang bersih, tertib, kuat, mampu dan berwibawa.

Di lingkungan infra struktur politik perlu diciptakan suatu iklim yang sehat dan bertanggungjawab sehingga stabilitas dan ketahanan nasional terpelihara dengan baik.

(4) Terciptanya suatu kondisi masyarakat yang serasi dan seimbang sehingga akan dapat menunjang laju pembangunan di daerah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan pendidikan politik rakyat di antaranya melalui penataran P-4 dalam wadah BP-7.

b) Aparatur Pemerintah.

(1) Peningkatan mutu aparatur pemerintah secara menyeluruh, melalui pendidikan dan kursus-kursus.

(2) Penambahan pegawai yang diperlukan untuk

masing-masing bidang dan wilayah dengan tenaga yang berpendidikan dan berkeahlian yang memadai.

- (3) Di dalam pembinaan pegawai perlu diciptakan sistim penjenjangan karier yang jelas bagi kemajuan setiap perangkat aparatur pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan titik berat otonomi daerah di letakkan pada daerah tingkat II.
- (5) Untuk menanggulangi keterbatasan daya jangkau pelayanan dan pengawasan diperlukan penataan kembali wilayah-wilayah pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa, termasuk penataan batas wilayah/daerahnya.
- (6) Penyempurnaan dan pemantapan struktur dan tata laksana pemerintah daerah secara tepat dan menyeluruh didasarkan pada Undang-undang Pokok Pemerintahan di Daerah dan ketentuan-ketentuan Pemerintah Pusat.
- (7) Pemantapan struktur dan tata laksana pemerintahan desa didasarkan pada Undang-undang Pemerintahan Desa (UU No. 5/1979) dan peraturan pelaksanaannya.
- (8) Ibukota-ibukota kabupaten dan kota-kota kecamatan yang pertumbuhannya cukup pesat diusahakan agar statusnya ditingkatkan menjadi kota administratif.
- (9) Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pemerintahan di daerah, dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna.

c) Hukum.

- (1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
- (2) Peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik melalui intensifikasi jangkauan peradilan maupun melalui pembinaan lembaga-lembaga bantuan hukum.
- (3) Perlu adanya kodifikasi hukum adat dan kebiasaan yang tumbuh serta berlaku dalam masyarakat.
- (4) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah

yang berkecimpung dalam bidang hukum.

(5) Peningkatan fungsi hukum sebagai alat untuk mendorong lajunya pembangunan serta untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.

d) Penerangan Pers dan Komunikasi.

(1) Penyebarluasan dan penyampaian informasi pembangunan harus dapat menjangkau semua desa secara tepat.

(2) Peranan media massa dalam ekstensifikasi dan intensifikasi penerangan masih perlu ditingkatkan terutama dalam hubungannya dengan penyampaian sebelas (11) paket penerangan.

(3) Peningkatan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat dalam rangka memperluas dukungan dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

4) Bidang Keamanan dan ketertiban masyarakat.

(1) Penanaman kesadaran akan pentingnya terciptanya stabilitas nasional yang dinamis guna menunjang suksesnya pembangunan Nasional.

(2) Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.

(3) Penanaman kesadaran bela Negara.

(4) Pemantapan pelaksanaan sistim HANKAMRATA dengan titik berat mewujudkan kekuatan keamanan yang ampuh dengan ketahanan nasional yang tangguh.

(5) Kemanunggalan TNI ABRI, dengan rakyat melalui ABRI Masuk Desa perlu ditingkatkan dan ditunjang.

(6) Upaya peningkatan memasyarakatkan pengertian ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial.

(7) Upaya peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme dan subversi serta bentuk kejahatan lainnya.

b. Kebijakanaksanaan Spatial.

Kebijakanaksanaan spatial merupakan usaha optimalisasi potensi di

setiap wilayah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan regional dan nasional.

Potensi dan permasalahan pembangunan di setiap wilayah mempunyai karakteristik spesifik masing-masing, oleh karena itu pengarahannya harus spesifik pula.

Arah kebijaksanaan perwilayah/spatial ini akan menjadi dasar penyusunan Repelita IV di setiap wilayah pembangunan dan daerah tingkat II yang bersangkutan.

Kebijaksanaan bidang/sector di setiap wilayah pembangunan tidak terlepas bahkan saling berkaitan dan saling menunjang dengan kebijaksanaan di setiap wilayah lainnya serta dengan kebijaksanaan di Jawa Barat secara keseluruhan.

Adapun kebijaksanaan di setiap wilayah pembangunan secara spesifik adalah sebagai berikut :

1) Wilayah Pembangunan Banten.

a) Wilayah bagian utara dikembangkan untuk daerah pertanian dan industri.

(1) Tenaga kerja yang tidak tertampung lagi di sektor pertanian harus dipersiapkan untuk mengisi kesempatan kerja di sektor non pertanian di kota-kota Serang, Cilegon, Merak dan Anyer.

(2) Pertanian pangan (padi palawija) serta perikanan dikembangkan di seluruh wilayah bagian utara ini, kecuali daerah Bojonegoro yang diarahkan pada pengembangan pertanian lahan kering dengan bobot terhadap konservasi sumber daya alam.

Usaha penyuluhan pertanian harus lebih dimantapkan demi terlaksananya pengembangan pertanian itu, juga guna mendukung pemanfaatan hasil perbaikan dan penyempurnaan prasarana pengairan.

Perindustrian, terutama yang berkaitan dengan industri baja, diarahkan ke daerah Cilegon yang akan diusahakan untuk berkembang menjadi kawasan industri.

(3) Perbaikan dan penyempurnaan prasarana pengairan di wilayah ini merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan guna mendukung pengembangan pertanian, perindustrian, serta untuk memenuhi kebutuhan air bagi

pemukiman.

(4) Pengembangan pelabuhan dengan fasilitas pendukungnya.

(5) Pengembangan potensi pariwisata.

b) Wilayah bagian tengah diarahkan untuk daerah pertanian dan konservasi.

(1) Pertanian yang akan dikembangkan adalah pertanian pangan (padi palawija, hortikultura), perkebunan dan perikanan darat yang terorientasi pada konservasi sumber daya alam. Di beberapa daerah dikembangkan juga industri kecil, kerajinan rakyat dan industri pariwisata.

(2) Konservasi sumber daya alam dilakukan secara terpadu dalam rangka pengembangan pertanian. Konservasi tersebut sangat penting artinya karena daerah ini merupakan sumber air, baik bagi wilayah bagian utara dan tengah maupun untuk wilayah bagian selatan.

c) Wilayah bagian selatan dikembangkan untuk daerah perkebunan dan pertanian campuran serta peternakan.

(1) Perkebunan dan pertanian campuran (pangan dan perkebunan) serta peternakan di samping kehutanan dapat dikembangkan hampir di seluruh wilayah ini, kecuali pengairan Teluk Lada.

Perikanan laut masih mungkin untuk dikembangkan di daerah pantai Selat Sunda dan Samudra Hindia dengan tempat-tempat pendaratannya di Labuan, Panimbang, Sumur, Muarabinuangeun, Pangarengan dan Bayah.

Industri yang diusahakan untuk dikembangkan di wilayah ini terutama industri yang mengolah hasil pertanian.

(2) Irigasi sederhana dan irigasi sedang kecil dikembangkan di beberapa daerah tertentu. Di daerah irigasi Teluk Lada dilakukan pencetakan sawah guna memanfaatkan prasarana pengairan yang telah dibangun.

Daerah Cagar Alam (Taman Nasional) Ujung Kulon dapat dikembangkan sebagai daerah wisata.

2) Wilayah Pembangunan Botabek.

a) Pertanian hortikultura yang juga berfungsi sebagai konservasi sumber daya air, dan hutan berdaur pendek yang juga berfungsi sebagai penunjang produksi bahan baku industri dikembangkan di daerah selatan yang dipertahankan sebagai daerah penyangga.

Usaha tani yang tidak memerlukan terlalu banyak lahan, seperti peternakan, dan hidroponik, akan dikembangkan di sekitar perbatasan Jakarta.

Industri dikembangkan dalam kawasan industri yang lokasinya diarahkan pada lahan kurang produktif bagi pertanian, sehingga tidak mengganggu/mengurangi lahan pertanian yang produktifitasnya tinggi atau yang telah dibangun irigasi.

b) Konservasi sumber daya alam dan sekaligus sebagai penyangga dilakukan dibagian selatan.

Penertiban jalur Bogor -- Puncak di bagian selatan ini diprioritaskan.

3) Wilayah Pembangunan Sukabumi.

a) Bagian utara dikembangkan sebagai daerah kehutanan, perkebunan, dan pariwisata.

b) Bagian selatan dengan pusat perkembangannya Pelabuhanratu diarahkan pada pengembangan perkebunan, dan kehutanan; peternakan besar di samping pertanian pangan di daerah Ciletuh, dan dicoba juga dikembangkan di daerah Jampang Kulon; serta perikanan laut dan industri pengolahannya di Pelabuhanratu.

4) Wilayah Pembangunan Purwasuka.

a) Pertanian padi sawah merupakan usaha tani utama di wilayah ini. Di samping itu melalui diversifikasi usaha tani dikembangkan pula pertanian palawija.

Budidaya perikanan diusahakan pula untuk mencapai manfaat optimal dari prasarana pengairan, dan diusahakan intensifikasi tambak ikan terutama udang di daerah pantai.

Tanah-tanah bera perlu diusahakan pemanfaatannya, Pertanian lahan kering dan peternakan diarahkan pengembangannya ke wilayah bagian selatan.

Industri-industri yang mengolah hasil pertanian dan menyediakan sarana pertanian perlu dikembangkan di beberapa daerah.

b) Beberapa kota antara lain Cikampek dan Pamanukan dikembangkan sebagai sub pusat pengembangan.

c) Reboisasi dengan bakau-bakau atau api-api perlu dilakukan di sepanjang pantai untuk menahan perembesan air laut jauh ke darat.

5) Wilayah Pembangunan Bandung Raya.

a) Di wilayah inti (Kotamadya dan Kabupaten Bandung) dikembangkan pusat pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, perdagangan, kebudayaan, dan pariwisata.

(1) Budidaya pertanian yang dikembangkan di wilayah inti ialah perkebunan, hortikultura, dan hijauan makanan ternak serta usaha peternakannya.

Industri secara selektif dikembangkan di sekitar Bandung.

(2) Lokasi pendidikan tinggi disebarakan di sekitar Bandung antara lain di Jatinangor.

(3) Utilitas dan fasilitas perkotaan terutama sebagai Ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat terus disempurnakan.

(4) Kota-kota pusat pertumbuhan dan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dikembangkan dengan jarak yang memadai di sekitar Kotamadya Bandung.

(5) Konservasi sumber daya alam dengan mengusahakan pengembangan hutan di bagian utara dan beberapa pegunungan yang merupakan sumber air.

b) Wilayah pengaruh yaitu Cianjur, Garut dan Sumedang dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

(1) Pertanian lahan kering dan peternakan dikembangkan di wilayah Sumedang, Garut dan Cianjur.

Tanaman padi, sayuran dan perikanan dikembangkan di wilayah bagian tengah yang berlahan basah.

(2) Industri dan pariwisata dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

6) Wilayah Pembangunan Cirebon.

a) Cirebon, sebagai pusat pengembangan diarahkan sebagai pusat perindustrian dengan penataan kawasan industri, pusat perdagangan dan pelabuhan samudra.

Daerah pengaruhnya adalah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.

b) Wilayah bagian utara yang berpengairan teknis di kembangkan pertanian padi sawah daerah padi, pantainya untuk perempangan (tambak ikan) di samping hutan payau/bakau-bakau serta perikanan laut/lepas pantai.

Tanaman sayuran dataran rendah dan buah-buahan serta peternakan unggas dikembangkan pula di bagian utara wilayah ini sesuai dengan spesifikasinya.

Di samping itu dikembangkan juga perkebunan tebu dan industri gula, serta industri pengolah bahan galian dan pariwisata.

c) Wilayah bagian selatan, dikembangkan ke arah pertanian ekspor dan industri pengolahan hasil pertanian untuk mendukung pengembangan pelabuhan samudra Cirebon.

Konservasi sumber daya alam diarahkan ke bagian hulu daerah aliran sungai.

d) Beberapa kota antara lain Jatibarang dan Kadipaten dikembangkan ke arah sub pusat pengembangan, penataan beberapa kota termasuk Ibu kota Kabupaten DT. II Cirebon akan diprioritaskan.

7) Wilayah Pembangunan Priangan Timur (Priatim).

a) Wilayah ini dikembangkan untuk membantu, mendukung pusat pengembangan Cilacap yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan samudra. Beberapa usaha penggalian dan pertanian dikembangkan di wilayah ini sehubungan dengan maksud tersebut.

b) Daerah Aliran Sungai Citanduy pengembangannya diarahkan kepada konservasi dan pemanfaatan daerah aliran sungai.

Pertanian padi sawah dan perkebunan kelapa dikembangkan di bagian selatan. Pertanian lahan kering (kebun campuran, perkebunan teh) dikembangkan dibagian utara disertai industri pengolahan hasilnya.

Budidaya udang akan dicoba dikembangkan di daerah sekitar Pangandaran.

Perikanan darat dikembangkan dengan pusatnya antara lain Singaparna. Industri kerajinan rakyat terus ditingkatkan dengan pusatnya Tasikmalaya.

c) Penetaan beberapa kota antara lain Banjar akan diprioritaskan.

d) Hutan Cagar Alam dan daerah tujuan wisata dikembangkan antara lain di Daerah Pangandaran.

5. SASARAN PEMBANGUNAN

a. Bidang Ekonomi.

1) Pertanian.

a) Produksi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan makin meningkat.

b) Tersusunnya rencana perwilayahan pembangunan pertanian dan kehutanan.

c) Wilayah Unit Desa/Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) serta catur sarannya makin mantap dan makin fungsional.

d) Usaha tani berkembang tidak hanya berorientasi kepada pasar tapi juga berdasarkan kemampuan wilayahnya.

e) Meningkatkan keikutsertaan petani/nelayan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian melalui kelompok-kelompok tani/nelayan dan koperasi-koperasi Unit Desa.

f) Meningkatkan dorongan dan bantuan perusahaan pertanian yang besar terhadap pengembangan usaha pertanian rakyat.

g) Konsolidasi pemilikan lahan terlaksana dan penyempitan pemilikan lahan lebih terkendali.

h) Dayaguna dan hasilguna prasarana pengairan makin meningkat dengan eksploitasi dan pemeliharaan yang lebih baik, serta meningkatnya peran serta para petani pemakai air seperti Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.

i) Seluruh jaringan irigasi yang mengalami kerusakan dapat berfungsi optimal kembali dengan

rehabilitasi yang sempurna.

- j) Terlaksananya pembangunan beberapa jaringan irigasi khusus, sedang-kecil, sederhana dan saluran tersier serta kuarternya yang studi kelayakannya sudah dilakukan dalam PELITA III.
- k) Terlaksananya pencetakan sawah-sawah baru di daerah yang memungkinkan seperti di daerah-daerah yang mendapat jaringan irigasi baru, daerah-daerah bekas tanah bera dan bekas rawa.
- l) Terlaksananya pembangunan pengairan pedesaan tanpa mengganggu jaringan irigasi yang sudah ada.
- m) Terlaksananya pembangunan bendung-bendung dan waduk-waduk serbaguna di daerah aliran Ci manuk, Ci Tarum, Ci Tanduy, dan Ci Sanggarung.

2) Industri.

- a) Produksi industri makin meningkat.
- b) Kawasan industri sudah tertata sesuai dengan rencana kawasan dan telah disesuaikan dengan arah pengembangan wilayah dan perkotaan.
- c) Industri kecil dan industri kerajinan rakyat makin berkembang antara lain dengan menggunakan sistim bapak angkat.
- d) Industri yang menghasilkan mesin, alat-alat dan sarana pertanian serta industri pengolahan hasil pertanian makin berkembang.

3) Pertambangan dan bahan galian.

- a) Pengusahaan pertambangan dan penggalian dengan teknologi tepat guna makin banyak dilakukan oleh rakyat kecuali yang secara teknis tidak mungkin maka pengusahaannya oleh negara.
- b) Terkendalinya penggunaan teknologi dengan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan tetapi juga kepada keselamatan dan kelestarian keseimbangan sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup yang makin mantap.

4) Energi.

- a) Makin banyak jenis sumber-sumber energi yang dipakai sesuai dengan potensi yang dimiliki Jawa barat.

b)Makin banyak daerah yang bisa menikmati listrik dan makin banyak industri yang menggunakan tenaga listrik.

c)Makin banyak percobaan dan pengembangan sumber serta teknologi energi murah yang sesuai dengan potensi pedesaan.

5) Perhubungan.

a)Meningkat dayaguna dan hasilguna prasarana angkutan darat (jalan dan jembatan) yang sudah berfungsi dengan pemeliharaan yang memadai dan dapat mempertahankan kondisinya yang sudah baik.

b)Terlaksananya pembangunan jalan-jalan bebas hambatan dengan feeder road-nya.

c)Berkembangnya jaringan jalan dan transportasi ke dan di daerah produksi.

d)Berkembangnya angkutan umum yang aman, murah, capt, tertib dan lancar, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

e)Berkembangnya angkutan kereta api dan berfungsi kembali jaringan kereta api yang sudah/pernah ada yang akhir-akhir ini tidak dipergunakan.

f)Berkembangnya pelabuhan-pelabuhan laut di pantai-pantai laut Jawa dan Selat Sunda.

g)Berkembang dan atau terlaksananya pembangunan pelabuhan-pelabuhan udara komersial.

h)Berkembang dan terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana pos di daerah-daerah terpencil, serta meningkatkannya jaringan telekomunikasi di ibu kota kabupaten yangsampai akhir Pelita III belum mempunyai telepon otomat.

6) Pariwisata.

a)Berkembang dan meningkatnya obyek-obyek wisata, terutama dengan peningkatan pelayanan dan promosinya.

b)Berkembang dan meningkatnya industri pariwisata melalui paket-paket pariwisata untuk merangsang arus wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

c)Meningkatnya prasarana dan sarana pariwisata dengan

memperhatikan sistem transportasi intermodel serta dikaitkan dengan kelestarian keseimbangan sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.

d) Terpelihara dan terbinanya mutu kebudayaan yang menjadi sumber obyek wisata, terutama keaslian kebudayaan rakyat Jawa Barat pada lokasi yang paling memungkinkan.

e) Berkembangnya kelembagaan dalam kegiatan kepariwisataan sehingga tercipta kegiatan terpadu.

7) Perdagangan.

a) Latihan para pedagang golongan ekonomi lemah lebih terencana dan terarah.

b) Terbentuknya lembaga-lembaga perdagangan dan atau pemasaran serta sistem tata niaga yang lebih menjamin produsen dan juga melindungi konsumen antara lain dengan memanfaatkan peningkatan kemetriologian.

8) Koperasi.

a) Memasyarakatnya kehidupan perkoperasian di Jawa Barat.

b) Pimpinan usaha koperasi makin terampil, makin luas pengetahuannya serta makin kuat pengabdianya terhadap perkembangan koperasi.

c) Anggota makin terlihat di setiap kegiatan koperasi.

d) Penyuluhan koperasi makin terpolakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di setiap wilayah pembangunan.

9) Dunia Usaha dan Golongan Ekonomi Lemah.

a) Terciptanya kerjasama yang serasi antara golongan usaha besar, menengah, kecil dan koperasi dengan semangat saling menguntungkan.

b) Peranan Kadin dalam pembinaan golongan ekonomi lemah lebih mantap lagi.

c) Lembaga Perkreditan makin meluas ke pedesaan.

d) Semangat kewiraswastaan, kemampuan dan keahlian para pengusaha golongan ekonomi lemah makin meningkat.

- 10) Tenaga Kerja.
 - a) Terlaksananya pendidikan dan peningkatan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di seluruh Jawa Barat.
 - b) Makin menurunnya jumlah penganggur, baik yang kentara maupun yang tidak dengan memperluas kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhannya.
 - c) Makin mantapnya peran kelembagaan tenaga kerja/buruh dalam hubungan perburuhan Pancasila.
 - d) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja/buruh wanita sesuai dengan kehormatan martabat dan kodratnya sebagai wanita.
- 11) Transmigrasi.
 - a) Makin meningkatnya usaha transmigrasi dari Jawa Barat.
 - b) Usaha transmigrasi makin berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
 - c) Terlaksananya transmigrasi secara terencana, terarah dan terpadu.
- 12) Pengembangan Daerah, Kota dan Desa.
 - a) Tersusunnya rencana kota secara tuntas di beberapa kota yang telah dirintis pada periode Pelita III dengan persepsi yang sama terhadap perundang-undangan dan atau peraturan yang berlaku.
 - b) Tersusunnya rencana lokasi kawasan industri.
 - c) Terlaksananya penyempurnaan kawasan industri.
 - d) Lebih berfungsinya aparat perencana dengan sistim perencanaan pembangunan yang lebih mantap dan operasional, serta meningkatnya sistim manajemen informasi yang serasi, seimbang dan selaras, secara horisontal dan vertikal pada semua tingkat dan jajaran pemerintahan.
 - e) Terlaksananya penunangan program pembangunan nasional di daerah yang berlokasi di Jawa Barat, dengan pendekatan regional dan sektoral.

f) Terbinanya secara mantap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai sarana dan wahana pembangunan masyarakat desa.

13) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

a) Tersusunnya rencana perwilayahan pertanian, kehutanan dan non pertanian yang sesuai dengan kelas kemampuan lahannya di seluruh Jawa Barat.

b) Terlaksananya usaha konservasi tanah dan air, baik dengan program penghijauan dan reboisasi maupun secara terpadu dalam kegiatan usaha tani, sehingga dapat mengurani area lahan kritis, serta mencegah timbulnya kembali lahan kritis.

c) Terlaksananya pelurusan dan pengamanan sungai, pembuatan dan perbaikan tanggul, pengerukan dan pembuatan pelimpahan sungai di daerah banjir, sehingga bahaya/bencana banjir terhindar.

d) Terlaksananya perbaikan lingkungan di kawasan industri, daerah perkotaan, dan daerah pedesaan secara terpadu.

e) Terlaksananya penunangan atas usaha pemerintah pusat dalam kegiatan penelitian dan pemetaan geologi, eksplorasi dan eksploitasi bahan-bahan mineral strategis serta vital, dan gas bumi di Jawa Barat.

f) Terselenggaranya penelitian, pengusahaan dan pemanfaatan bahan mineral strategis serta vital menjadi hasil produksi yang berbentuk bahan baku atau bahan jadi untuk ekspor dan keperluan dalam negeri.

Usaha tersebut dilakukan di daerah pertambangan yang produktif dengan tetap memperhatikan keserasian, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

1) Agama.

a) Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin meningkat.

b) Saling Pengertian antara umat beragama dengan pemerintah dan di antara umat beragama makin tinggi, sehingga terjalin kerukunan antar umat beragama.

- c) Dibangunnya sarana peribadatan sesuai dengan kebutuhan atas dasar perbandingan yang memadai antara umat beragama dengan sarana peribadatannya terutama di lingkungan tempat tinggal.
- d) Terwujudnya Pusat pengembangan Agama Islam.
- e) Terlatihnya secara berencana dan terarah pada pembina bidang keagamaan disesuaikan dengan stratifikasi wilayah pemahaman keagamaannya.
- f) Penggalan dan pengolahan dana keagamaan dari berbagai sumber makin berdayaguna.
- g) Terlatihnya para pengurus lembaga dan organisasi keagamaan, baik yang menyangkut manajemen, teknis administrasi dan keuangan maupun motivasinya.
- h) Tersusunnya pola pendidikan keagamaan baik untuk pendidikan formal, non formal maupun informal.
- i) Perbanyak buku-buku keagamaan, misalnya tafsir Al'Quran dalam bahasa Sunda disesuaikan dengan daya jangkauan pengetahuan dan daya beli masyarakat.
- j) Tersusunnya sistim penyuluhan dan pelayanan keagamaan yang terpadu.
- k) Makin tertibnya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk kelancaran pelaksanaannya.

2) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Terbinanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, dan pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Pendidikan.

- a) Ilmu dan teknologi yang berorientasi kepada pembangunan daerah lebih berkembang. Di tingkat Propinsi dilakukan studi-studi multidisipliner dan interdisipliner dalam bidang ilmu dan teknologi dalam rangka mengungkap masalah-masalah daerah
- b) Keluarga merupakan pusat pendidikan formal, informal dan non formal terutama di pedesaan,

oleh karenanya PKK yang merupakan senjata utamanya harus lebih meningkat.

c) Daya tampung sekolah menengah terutama kejuruan meningkat. Pengembangan sekolah kejuruan disesuaikan dengan perkembangan perwilayahan, untuk wilayah industri diutamakan sekolah kejuruan industri atau pertukangan.

d) Buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar terberantas, kewajiban belajar bagi anak-anak usia sekolah terlaksana dan anak-anak usia sekolah dasar semuanya tertampung.

e) Perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta mutu dan daya tampungnya meningkat.

f) Kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah lebih meningkat lagi terutama di dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

g) Latihan dan pendidikan keterampilan yang berorientasi kepada penciptaan lapangan kerja lebih terencana dan terkoordinasikan.

h) Meningkatnya daya dan minat membaca di lingkungan masyarakat serta meningkatnya usaha pengadaan dan penyebaran perpustakaan termasuk perpustakaan berbahasa Sunda.

i) Meningkatnya peranan keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan di samping pemerintah.

4) Kebudayaan.

a) Kebudayaan yang mendukung dan yang menghambat pembangunan di setiap wilayah pembangunan teridentifikasi melalui penelitian.

b) Kebudayaan daerah Jawa Barat yang menonjol terinventarisasikan dan terdokumentasikan secara baik dan berdayaguna.

c) Terciptanya iklim yang memberikan daya kreasi, apresiasi, apresiasi bagi para seniman dan budayawan yang mencerminkan kepribadian bangsa.

d) Terbangunnya tempat-tempat pengembangan kesenian, baik untuk olah seni maupun untuk pagelaran-pagelarannya.

e) Tempat-tempat dan barang-barang peninggalan

sejarah di daerah Jawa Barat terpelihara dengan baik dan berdayaguna.

- 5) Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.
 - a) Terlaksananya penelitian, percobaan, pengembangan pengetahuan dan teknologi, yang mendukung pembangunan daerah Jawa Barat.
 - b) Berkembangnya minat remaja dalam penelitian dan percobaan serta penulisan ilmiah, terutama yang menyangkut teknologi tepat guna.
- 6) Kesehatan.
 - a) Tingkat Kesehatan Masyarakat makin membaik.
 - b) Sarana pelayanan kesehatan makin dekat ke masyarakat dan fungsional.
 - c) Sistem penyuluhan kesehatan diutamakan kepada kesadaran dan kemampuan hidup sehat dan lingkungan hidup sehat di daerah-daerah rawan kesehatan.
 - d) Daerah epidemis terlokalisasi.
 - e) Terlatihnya petugas-petugas kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 - a) Tingkat Pertumbuhan penduduk.
 - (1) Terkendalinya tingkat pertumbuhan penduduk sampai batas yang memungkinkan dengan ditingkatkannya Program Keluarga Berencana dan Transmigrasi umum serta spontan, baik di pedesaan maupun perkotaan.
 - (2) Terkendalinya tingkat migrasi masuk yang dalam pelaksanaannya perlu penelitian dan pengendalian secara terpadu.
 - b) Penyebaran Penduduk.
 - (1) Terlaksananya penyebaran penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan secara seimbang terutama pergeseran penduduk di sektor pertanian.
 - (2) Penyebaran penduduk di masing-masing wilayah pembangunan yang sesuai/seimbang dengan kondisi dan potensi wilayah pembangunan yang bersangkutan.
- 8) Perumahan dan Pemukiman.

- a) Tersedianya perumahan rakyat di daerah perkotaan dan pedesaan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan sehat, kuat dan terjangkau oleh daya beli masyarakat luas, dengan memperhatikan tata ruang yang ditunjang oleh prasarana fisik, fasilitas dan utilitas yang memadai.
- b) Terlaksananya industri perumahan sederhana dan industri bangunan di daerah perkotaan melalui peran serta usaha swasta dalam pembangunan perumahan.
- c) Terselenggaranya perbaikan kampung di lingkungan perumahan slum di daerah perkotaan di Jawa Barat.
- d) Tersusunnya rencana perkotaan dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang.
- e) Terselenggaranya perbaikan penyempurnaan pemukiman rakyat, dan pemukiman kembali rakyat dari daerah bencana alam serta akibat proyek-proyek vital, yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang bersangkutan.

9) Kesejahteraan Sosial.

- a) Taraf kesejahteraan sosial keluarga miskin yang makin meningkat dan tercegah timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial yang lebih parah.
- b) Terselenggaranya perawatan dan penyantunan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Taraf kesejahteraan sosial Keluarga Veteran Pejuang Kemerdekaan dan peran sertanya dalam pembangunan yang makin meningkat.
- d) Terbebaskannya para korban bencana alam dari penderitaan yang lebih parah dan tumbuhnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam.
- e) Cukup tersedianya sarana penyelenggaraan rehabilitasi dan santunan sosial yang memadai dan layak.
- f) Terselenggaranya usaha-usaha kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin melembaga dan terorganisasikan.

10) Generasi Muda.

- a) Makin terbinanya saling pengertian antara generasi muda dengan generasi tua.
- b) Berkembangnya semangat juang di kalangan generasi muda.
- c) Iklim yang menunjang dinamika dan kreativitas generasi muda makin tumbuh dan berkembang.
- d) Tersedianya sarana pengembangan generasi muda.

1) Olah raga.

- a) Pola pembinaan keolahragaan prestasi di kalangan remaja tersusun sesuai dengan pola pendidikan formal dan non formal dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga.
- b) Tersedianya tenaga pembina olah raga untuk berbagai cabang olah raga di berbagai daerah potensial.

2) Peranan Wanita dalam Pembangunan.

- a) Pengetahuan dan keterampilan kaum wanita makin meningkat.
- b) Rasa percaya diri makin tumbuh dan berkembang serta meningkatnya peran serta wanita dalam pembangunan.
- c) Tanggungjawab peran ganda makin meningkat dalam rumah tangga dan berkarya bagi masyarakat serta dalam hubungannya dengan usaha-usaha pembinaan bangsa, sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta kebutuhan lingkungan sosialnya.
- d) Kedudukan wanita sebagai pendidik utama dan pertama bagi pembentukan generasi muda sebagai penerus bangsa makin meningkat.
- e) Makin mantap dan berkembangnya kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

c. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah Hukum, Penerangan dan Media Massa.

1) Politik.

- a) Kesadaran atas hak dan kewajiban seluruh lapisan masyarakat sebagai warga negara semakin meningkat.
- b) Makin mantapnya penghayatan dan pengamalan

Pancasila dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

c) Daya tanggap supra struktur politik terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat makin meningkat.

d) Semakin meningkat dan mantapnya peranan partai-partai Politik dan Golongan Karya dalam pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila.

2) Aparat Pemerintahan.

a) Mutu dan jumlah aparatur pemerintah di daerah mencapai atau minimal mendekati standar yang diperlukan.

b) Tersusunnya rencana pembinaan pengembangan karier pegawai.

c) Struktur pemerintahan di daerah lebih mantap sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan Undang-undang Pokok Pemerintahan di daerah.

d) Titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II.

e) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana pemerintahan di daerah terutama di tingkat kecamatan.

f) Koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di daerah semakin serasi dan fungsional.

g) Wilayah administrasi kabupaten, kecamatan dan desa dimekarkan sesuai dengan lajunya pembangunan.

h) Struktur pemerintahan desa sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugas yang ditetapkan oleh Undang-undang Pemerintahan Desa dan Peraturan pelaksanaannya.

3) Hukum.

a) Berperannya hukum sebagai penunjang dalam pembangunan.

b) Kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat makin meningkat.

c) Daya jangkau lembaga-lembaga bantuan hukum meluas minimal sampai ke kota-kota kabupaten.

- d) Tersusunnya kodifikasi hukum adat/kebiasaan yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.
 - e) Terlatih dan terdidiknya aparaturnya penegak hukum di daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- 4) Penerangan, Pers, dan Komunikasi.
- a) Informasi pembangunan, baik dari atas ke bawah, maupun dari bawah ke atas makin lancar dan Cepat.
 - b) Peranan media massa makin fungsional terutama dalam penyampaian sebelas paket penerangan.
 - c) Mantapnya instruksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat dalam rangka memperluas dukungan dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- d) Bidang Keamanan dan ketertiban Masyarakat:
- a) Kesadaran bela Negara masyarakat makin meningkat.
 - b) Pelaksanaan sistim Hamkamrata makin mantap, terutama di daerah-daerah rawan.
 - c) Makin terlatih dan terorganisasinya kekuatan rakyat.
 - d) Tercegahnya gangguan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran dan keberhasilannya pembangunan.
 - e) Stabilitas dan ketertiban masyarakat sebagai kondisi penyangga kelangsungan pembangunan di daerah terpelihara secara mantap.
 - f) Citra kehadiran dan penerapan fungsi kedua ABRI sebagai kekuatan sopsol di tengah-tengah masyarakat semakin mantap.
 - g) Makin meningkatnya kewaspadaan terhadap bahaya latin komunisme, subversip, dan bentuk kejahatan lainnya.

6. STRATEGI PEMBIAYAAN.

a. Strategi Pembiayaan Pembangunan:

- (1) Sesuai dengan penggarisan nasional bahwa pembangunan daerah harus diarahkan pada peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat maka strategi pembiayaan diarahkan kepada pendayagunaan potensi dana yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian diusahakan agar kontribusi pembiayaan sektor masyarakat atau swasta tetap lebih besar dari pembiayaan pembangunan pemerintah.

(2) Untuk itu upaya menciptakan iklim berusaha yang baik perlu lebih digalakkan, baik melalui pengaturan tertentu maupun melalui pembangunan prasarana dan sarana ekonomi yang menunjang terhadap perkembangan ekonomi masyarakat terutama di daerah pedesaan.

(3) Diusahakan agar pengarahan penggunaan anggaran APBN di daerah berorientasi kepada program-program daerah, sebab program daerah tersebut tidak hanya untuk kepentingan daerah semata-mata tetapi juga bagi kepentingan nasional.

Oleh karenanya diusahakan terus agar pengarahan penggunaan anggaran tersebut dengan program daerah.

Dengan demikian di daerah hanya ada satu konsep pembangunan dan hanya ada satu rencana pembangunan yaitu konsepsi dan rencana pembangunan daerah yang tertuang di dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Pelita IV Daerah.

(4) Anggaran pendapatan asli daerah diarahkan terutama untuk memperbesar biaya pemeliharaan dan rehabilitasi barang modal milik pemerintah daerah serta diarahkan kepada usaha yang berkaitan dengan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

(5) Dari segi penerimaan anggaran daerah diusahakan sumber-sumber pendapatan yang berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan masyarakat. Dengan demikian peningkatan dan intensifikasi pungutan tersebut tidak akan dirasakan terlalu berat mengingat bahwa wajib pajak tersebut meningkat pendapatannya.

Diusahakan pula agar pungutan pada lapangan usaha produktif tidak terlalu berat dibandingkan dengan usaha yang bersifat konsumtif.

b. Prinsip Penyusunan Anggaran:

Penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan di daerah harus berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Berorientasi kepada program,
- (2) Program yang berkesinambungan dan konsisten,
- (3) Urgensi program,
- (4) Program yang berhasilguna dan berdayaguna,
- (5) Anggaran berimbang dan dinamis.

BAB IV

PENUTUP

1. PELAKSANAAN.

- (1) Pola dasar Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
- (2) Pelaksanaan Pola Dasar pembangunan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam bentuk Repelita Daerah dengan memperhatikan saran-saran, pendapat DPRD Tingkat I dalam rangka penetapan Peraturan Daerah tersebut dalam butir (1).
- (3) Tiap lima tahun sekali Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan nasional dan perkembangan Daerah Jawa Barat.
- (4) Agar terwujudnya hasil Pola Dasar Pembangunan Daerah Jangka Panjang Jawa Barat ini, diusahakan pelaksanaannya secara bertahap. Tahap-tahap pelaksanaan ini tercermin dalam rangkaian Pelita-Pelita dan Program Tahunan, dimana keseluruhan rangkaian tersebut merupakan satu kesatuan yang serasi dan tidak terpisahkan.
- (5) Pada prinsipnya, titik berat sektor pembangunan yang diutamakan dan kebijaksanaan dasar di setiap tahap Pelita Jawa Barat, sesuai dengan perumusan yang ada pada tahap-tahap Pelita Nasional, sebagai tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

2. PERSYARATAN.

- (1) Berhasilnya pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin keteladanan para penyelenggara pemerintahan di daerah serta pada partisipasi seluruh rakyat Jawa Barat.
- (2) Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Jawa Barat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin.
- (3) Kesejahteraan yang berkeadilan sosial sekaligus akan menegakkan ketahanan nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bandung, 31 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI